



# Pedoman Perilaku Peliputan Bencana dan Krisis di Indonesia



Save the Children

# Pedoman Perilaku Peliputan Bencana dan Krisis di Indonesia



# **Pedoman Perilaku Peliputan Bencana dan Krisis di Indonesia**

## **Penulis**

1. Ahmad Arif
2. Erick Tanjung
3. Asnil Bambani
4. Afwan Purwanto

## **Pengunting**

1. Ahmad Arif
2. Dewi Sri Sumanah

## **Tata letak & Cover**

Sumarno

## **Didukung oleh**

Save the Children Indonesia

## **Penerbit**

### **Save the Children Indonesia**

Jl. Bangka IX No. 40 AB  
Kel. Pela Mampang,  
Kec. Mampang Prapatan,  
Jakarta Selatan 12720

[www.savethechildren.or.id](http://www.savethechildren.or.id)

© 2021

## KATA PENGANTAR

# SEKRETARIS UTAMA

## Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat atas terbitnya buku “Pedoman Peliputan Bencana dan Krisis” yang disusun oleh Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK) Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta yang didukung oleh Save the Children. Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya.

Pedoman ini, begitu penting untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) wartawan dalam peliputan bencana. Mulai dari pengelolaan risiko, pemeliharaan hingga rehabilitasi pasca bencana.

Terkait ini, kami juga sudah melakukan dukungan beberapa pelatihan wartawan di beberapa provinsi di Indonesia. Peran media dalam mengedukasi masyarakat luas soal bencana pun perlu menjadi perhatian. Untuk itu, wartawan yang paham soal pemberitaan kebencanaan menjadi kunci.

Untuk mendukung kerja-kerja wartawan, BNPB pun saat ini telah membentuk Forum Wartawan Peduli Bencana (WAPENA). Sehingga, para wartawan pun dapat dengan akurat dan cepat mendapatkan informasi kebencanaan aktual di lapangan.

Kami juga mempunyai informasi Siaga Bencana yang memberikan informasi kepada rekan-rekan media terhadap potensi bencana yang akan mereka liput. Selain itu, buku siaga bencana dan COVID-19 yang kami miliki, juga bisa menjadi pendukung buku Pedoman Peliputan Bencana yang dirilis oleh JBK Indonesia dan AJI Jakarta.

Pesan saya, pemberitaan soal bencana dan krisis semestinya bukan hanya harus mengedukasi dan memberikan informasi risiko kebencanaan. Namun, juga harus menjamin keselamatan jurnalis yang meliput berita bencana dan krisis.

Maka dari itu, buku pedoman bencana dan krisis ini hadir untuk edukasi sekaligus memberikan perlindungan terhadap profesionalisme jurnalis. Selamat berkarya!

Ttd

**Lilik Kurniawan**

Sekretaris Utama

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia

## KATA PENGANTAR

# KETUA JURNALIS BENCANA DAN KRISIS (JBK)

## Indonesia

Berada di zona Cincin Api, Indonesia memiliki kerentanan bencana geologi, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga letusan gunung api. Sedangkan kondisi geografis kepulauan dan topografi berbukit menyebabkan Indonesia juga rentan terdampak bencana terkait cuaca, seperti banjir dan longsor. Krisis iklim yang kini melanda menambah kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi, yang dalam satu dekade terakhir berlipat frekuensinya. Selain itu, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga rentan terdampak wabah penyakit menular, seperti pandemi Covid-19 yang telah menewaskan ratusan ribu orang di negeri ini, termasuk di antara korban adalah para jurnalis.

Bagi jurnalis, bencana merupakan peristiwa sangat penting untuk diliput, karena hal ini menyangkut bagi nasib dan kepentingan banyak orang. Media-media massa dituntut bisa memberikan informasi kepada masyarakat selama siklus bencana dan krisis, sejak dari kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Bahkan, menurut Lembaga PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR), media massa memiliki tanggungjawab besar untuk mengedukasi publik agar bisa terhindar dari dampak dan kerugian bencana. Aspek mitigasi dan edukasi ini sejauh ini masih kerap dilupakan oleh media massa di Indonesia, karena rata-rata lebih fokus pada pemberitaan pasca kejadian dengan pendekatan *bad news is good news*.

Peran media massa juga semakin dibutuhkan di tengah maraknya sebaran hoaks dalam setiap kejadian bencana, terutama yang disebarakan

melalui media sosial. Media massa harus bisa berperan sebagai *clearing house* atau memberikan informasi yang akurat dan mencerahkan. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 saat ini telah memicu gelombang infodemik, yaitu informasi salah yang bisa menyesatkan publik dan mempersulit upaya untuk mengatasi wabah kali ini.

Namun demikian, di tengah besarnya tuntutan dan tanggungjawab, pekerja media termasuk kelompok yang sangat rentan terdampak selama berlangsungnya bencana dan krisis. Oleh karena itu, pekerja media juga dituntut memahami risiko selama peliputan sehingga tidak menjadi korban.

Buku pedoman peliputan bencana dan krisis ini diharapkan bisa memberi panduan bagi pekerja media, baik yang di lapangan maupun di ruang redaksi, dalam peliputan bencana dan krisis yang lebih berkualitas dan mencerahkan publik, selain juga menjunjung keselamatan jurnalis.

Ttd

**Ahmad Arif**

Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK) Indonesia

## KATA PENGANTAR

# CHIEF OF HUMANITARIAN & RESILIENCE

## Save the Children Indonesia

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana yang tinggi, dengan ancaman seperti gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Hal ini disebabkan karena Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lempeng pasifik.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa selama tahun 2020, terdapat sebanyak 4.650 kejadian, yang didominasi oleh kejadian bencana alam seperti banjir, puting beliung dan tanah longsor. Bencana alam ini menimbulkan terdampak dan mengungsi sebanyak 6.796.707 jiwa, serta 418 jiwa meninggal dan hilang. Dalam setiap kejadian bencana, anak – anak merupakan kelompok paling rentan dan menghadapi risiko yang besar.

Salah satu upaya pertolongan dan tanggap darurat bencana yang cepat dan tepat juga dapat diperoleh dari penyebaran informasi yang tepat dan sesuai kebutuhan melalui peliputan serta pemberitaan yang dilakukan oleh Jurnalis dan Media. Dengan Mengedepankan prinsip kemanusiaan dan peliputan bencana sesuai kaidah jurnalistik, penting bagi para jurnalis mengetahui pedoman perilaku dalam peliputan bencana dan krisis.

Save the Children Indonesia sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada rekan rekan Jurnalis Bencana dan Krisis, AJI Jakarta, Dewas Pers, BNPB, BPBD Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh jurnalis yang terlibat dalam berbagai workshop untuk mempertajam seluruh isi dari pedoman ini.

Pedoman perilaku dalam peliputan bencana dan krisis ini meliputi dua hal utama, yaitu tentang bagaimana meliput yang aman, dan kedua masyarakat bisa aman dari peliputan media. Aman dari peliputan media dimaksudkan agar peliputan bencana dan krisis tidak memicu bencana atau krisis menjadi lebih dalam. Media memiliki tanggungjawab untuk turut menjaga lingkungan dan komunitasnya melalui bencana dan krisis dengan prinsip meminimalkan korban maupun kerugian.

Dengan diimplementasikannya pedoman perilaku ini, semoga seluruh peliputan bencana dan krisis di Indonesia dapat dilakukan dengan aman dan tidak memperdalam dampak dari bencana dan krisis tersebut.

Ttd

**Dino Satria**

Chief of Humanitarian & Resilience  
Save the Children Indonesia

# DAFTAR ISI

## Kata Pengantar

### **Sekretaris Utama**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia **3**

### **Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK)**

Indonesia **5**

### **Chief of Humanitarian & Resilience**

Save the Children Indonesia **7**

**DAFTAR ISI** **9**

**UCAPAN TERIMA KASIH** **11**

## **BAB I Latar Belakang dan Pendahuluan**

Kerentanan Bencana di Indonesia **13**

Media dalam Bencana dan Krisis **17**

Praktik Peliputan Bencana di Indonesia **19**

## **BAB II Pedoman Peliputan Bencana dan Krisis**

Pentingnya Pedoman Perilaku bagi Jurnalis **21**

Prinsip Dasar **23**

Ruang Lingkup **23**

Kelompok Sasaran **27**

Tantangan Peliputan Bencana di Indonesia **30**

Kewajiban Perusahaan Media **37**

Pelaksanaan **37**

<b>BAB III</b>	<b>Pedoman Keamanan dan Peliputan</b>	
	Pedoman Keamanan	37
	- Tahapan Prabencana	43
	- Saat Bencana	50
	- Setelah Bencana	55
	Pedoman Liputan	56
	- Pra Bencana	56
	- Saat Bencana	58
	- Setelah Bencana	63
	Kewajiban Media	64
<b>BAB IV</b>	<b>Penjelasan Tata Cara Peliputan</b>	<b>67</b>
	Prapeliputan Bencana dan Krisis	67
	Setelah Peliputan	71
	Pasca Peliputan atau Penulisan tentang Bencana dan Krisis	74

# Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih kepada Semua nama di bawah ini yang telah berkontribusi aktif dalam mengembangkan buku pedoman ini. Pengalaman dan tantangan dalam setiap peliputan Bencana menjadi inspirasi dan sumber informasi sehingga buku pedoman perilaku peliputan bencana dan krisis ini komprehensif.

Abdul Karim Angkotasari

Afifuddin

Agung Sedayu

Aidil Ichlas

Anang Zakaria

Andry Haryanto

Bambang Murjianto

Bhekti Suryani

Endah

Erwin Daryanto

Firman Agus

Fitri Rachmawati

Ika Ningtyas

Irvan Imamsyah

Jekson Simanjuntak

Kharishar Kahfi

Liston Aqurat

Miftah Farid

Moh. Ridwan Lapasere

Muhamad Iqbal

Nani Afrida

Qodriansyah Agam Sofyan

Rommy Roosyana

Upi Asmaradana,

Wina Setyawatie

Yose Hendra.



*Thomas Gustafian-October 16, 2018 / Save the Children.*

# BAB I

# Latar Belakang dan Pendahuluan

## Latar Belakang

### Kerentanan Bencana di Indonesia

Berada di zona geologi yang sangat aktif, Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terdampak bahaya alam gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Bahkan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia dengan 127 gunung api aktif, yang sebagian di antaranya rutin meletus. Indonesia juga sangat rentan terdampak bahaya hidrometeorologi seperti banjir, longsor, puting beliung hingga kebakaran hutan yang intensitasnya semakin meningkat seiring terjadinya perubahan iklim.

Laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (United Nations Disaster Risk Reduction/UNDRR) berdasarkan data dari Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), EM-DAT (International Disaster Database), di Geneva, Swiss pada 2019 menyebutkan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah korban jiwa akibat bencana alam tertinggi sepanjang tahun 2018. Dari total 10.373 korban jiwa di seluruh dunia pada tahun itu, 4.535 orang di antaranya dari Indonesia.

Bahaya geologi, yaitu gempa, tsunami, dan gunung meletus, menjadi penyebab utama kematian secara global. Sebanyak 4.417 korban tewas akibat aktivitas geologi ini dari Indonesia, 425 jiwa dari Guatemala, dan 145 jiwa dari Papua Niugini. Pendataan CRED juga memaparkan, Indonesia menjadi penyumbang korban jiwa akibat bencana yang sangat

besar sejak tahun 2000. Korban jiwa akibat tsunami Aceh tahun 2004 mencapai 242.765 jiwa, merupakan korban jiwa terbesar kedua setelah gempa di Haiti yang menewaskan 297.140 jiwa pada 2010.

Mengacu pada definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bencana merupakan gangguan serius pada komunitas atau masyarakat luas, kerugian material, ekonomi, yang melebihi kemampuan dari komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk diatasi menggunakan sumber dayanya sendiri.<sup>1</sup>

Selain bahaya dari alam seperti letusan gunung api dan gempa bumi, bencana juga bisa dipicu oleh faktor manusia atau biasa disebut sebagai *man made hazard*. Ini meliputi keadaan darurat akibat konflik dan peperangan, kelaparan, pengungsian, kecelakaan industri dan kecelakaan transportasi. Perubahan iklim juga bisa dimasukkan sebagai ulah manusia. Bencana kelaparan yang menyebabkan meninggalnya 72 anak di Kabupaten Asmat, Papua pada 2018 lalu bisa digolongkan dalam ancaman karena ulah manusia ini. Demikian halnya konflik bersenjata di Papua dan sebelumnya di Aceh selama 32 tahun juga bisa digolongkan dalam kategori ini. Contoh lain adalah kecelakaan pesawat terbang yang berulang kali merenggut korban nyawa, selain juga kecelakaan lalu lintas darat, dan perairan.

Bencana juga bisa terjadi dari kombinasi faktor alam dan ulah manusia, dia antaranya terjadinya wabah penyakit seperti yang saat ini melanda. Infeksi mikroorganisme, termasuk virus, yang memicu berbagai penyakit merupakan peristiwa biasa yang terjadi sejak awal sejarah manusia. Namun demikian, kerusakan ekosistem dan ekstraksi sumber daya alam berlebih bisa memicu mutasi dan lompatan virus yang semula berada di hewan ke manusia. Jadi, peristiwa pandemi seperti Covid-19

---

<sup>1</sup>[https://www.unisdr.org/files/7817\\_UNISDRTerminologyEnglish.pdf](https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf)

yang saat ini menginfeksi bisa dianggap sebagai kombinasi antara ancaman dari alam dan kesalahan manusia itu sendiri.

Catatan sejarah menunjukkan, Indonesia juga telah berulang kali mengalami wabah yang mengancam kesehatan, bahkan nyawa. Hingga Minggu (8/8/2020), Covid-19 telah menginfeksi 121.226 orang di Indonesia, dan 5.593 di antaranya meninggal dunia. Jumlah korban yang meninggal dengan status suspek atau diduga Covid-19 jauh lebih banyak lagi. Indonesia kini telah menempati urutan ke-23 negara dengan jumlah kasus dan korban jiwa terbanyak di dunia. Dengan belum ada tanda-tanda wabah bisa dikendalikan, jumlah kasus dan korban jiwa akibat Covid-19 di Indonesia diperkirakan masih bisa terus bertambah.

Sebagian besar bencana tidak dapat diprediksi secara akurat, tetapi dapat diantisipasi dan dikurangi risikonya. Walaupun sumber ancamannya bisa dari alam maupun ulah manusia sendiri, namun tidak ada yang “alami” tentang bencana. Kita tidak bisa mencegah letusan gunung api dan gempa bumi, tetapi kita bisa mencegahnya menjadi bencana. Gunung api yang meletus di tengah hutan belantara, misalnya, merupakan bahaya dan fenomena alam biasa. Namun jika meletus di dekat kota besar bisa menjadi bencana yang mengancam kehidupan ratusan ribu orang. Demikian halnya, gempa bumi merupakan bahaya alam dan siklus yang biasa. Dia menjadi bencana, jika menimbulkan korban jiwa dan atau kerugian material.

Maka, dalam manajemen bencana dikenal istilah pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Misalnya, untuk mengurangi risiko bencana gunung api, kita bisa melakukan dengan mengosongkan hunian di zona bahaya, mendidik dan mengingatkan masyarakat tentang bahayanya, dan mempersiapkan mereka untuk mengungsi saat gunung berapi meletus dan, mengidentifikasi tempat penampungan untuk melindungi mereka. Demikian halnya, untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi, kita bisa membangun rumah tahan gempa.

Setelah memahami bahwa ada perbedaan antara “bahaya alam” dan “bencana”, kini kita bisa mengerti bahwa bencana sebagian besar terkait dengan ulah manusia, dan risiko membesar seiring dengan aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, urbanisasi yang cepat, degradasi lingkungan dan perubahan iklim, selain keteledoran dalam penggunaan teknologi dan berbagai peralatan modern. Dengan keberulangan kejadian bencana yang menelan korban jiwa, Indonesia dianggap masih lemah dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Hal ini menyebabkan dampak bencana bisa sangat besar, baik dari jumlah korban maupun kerugian material.



## Media dalam Bencana dan Krisis

Bagi jurnalis, bencana adalah jenis peristiwa yang perlu diliput secara luas. Bahkan, di tengah bencana alam dan krisis sosial dan kesehatan, media massa selalu dituntut bisa memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat selama siklus bencana dan krisis, sejak dari kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Bahkan, menurut Lembaga PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR), media massa memiliki tanggungjawab besar untuk mengedukasi publik agar bisa terhindar dari dampak bencana.

Terkait peran ini, langkah pertama yang bisa dilakukan media adalah memahami bencana dengan lebih baik, dan kemudian menyebarkan pengetahuan itu sebagai edukasi publik. Pertama, perlu difahami bahwa dampak bencana bisa dikurangi dengan mitigasi dan pencegahan. Oleh karena itu, media sebaiknya menghindari istilah “bencana alam” dan gunakan sebagai gantinya “bencana” atau “bahaya alam”. Ini akan membantu mengubah cara pandang para pemimpin dan masyarakat luas melihat bencana. Dengan demikian, kita akan membantu mendorong budaya pencegahan dan bukan hanya budaya reaksi.

Berikutnya, dampak bencana bisa sangat berbeda bagi setiap orang. Ada kelompok yang cenderung lebih rentan dibandingkan yang lain. Misalnya, orang miskin lebih banyak terkena bencana daripada kelompok ekonomi lainnya. Data menunjukkan, sebagian besar dari 3,3 juta kematian akibat bencana dalam 40 tahun terakhir terjadi di negara yang lebih miskin. Orang miskin juga adalah orang yang paling menderita dalam jangka panjang setelah bencana karena mereka tidak memiliki cukup sumber daya, termasuk asuransi sehingga tidak bisa pulih dengan cepat. Selain itu, wanita, orang lanjut usia, dan anak-anak

---

2 [https://www.unisdr.org/files/20108\\_mediabook.pdf](https://www.unisdr.org/files/20108_mediabook.pdf)

juga tergolong kelompok rentan. Data IUCN menunjukkan, wanita dan anak-anak 14 kali lebih mungkin meninggal daripada pria saat bencana. Di negara-negara industri, lebih banyak wanita daripada pria yang meninggal selama itu gelombang panas melanda Eropa pada 2003, lebih banyak wanita Afrika-Amerika yang terpengaruh oleh Badai Katrina pada tahun 2005 dibandingkan laki-laki, demikian juga saat tsunami Aceh 2004 sebagian besar korbannya wanita dan anak-anak. Save the Children melaporkan bahwa lebih dari 50 persen dari semua yang terkena bencana di seluruh dunia adalah anak-anak.<sup>3</sup>

Di tengah tren maraknya sebaran hoaks dalam setiap kejadian bencana, terutama yang disebarakan melalui media sosial, peran media massa lebih dibutuhkan publik menjadi *clearing house* atau memberikan informasi yang mencerahkan. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 saat ini telah memicu gelombang infodemik, yaitu informasi salah yang bisa menyesatkan publik dan mempersulit upaya untuk mengatasi wabah kali ini.

Namun demikian, di tengah besarnya tuntutan dan tanggungjawab ini, situasi bencana juga bisa menjadi ancaman bagi pekerja media, terutama yang berada di lapangan. Pekerja media termasuk kelompok yang sangat rentan terdampak selama berlangsungnya bencana dan krisis. Oleh karena itu, selain memahami tentang peliputan yang berkualitas dan bisa mencerahkan publik, pekerja media juga dituntut memahami risiko selama peliputan sehingga tidak menjadi korban.

---

3 Ibid

## Praktik Peliputan Bencana di Indonesia

Media di Indonesia kerap dikritik dalam peliputan bencana. Alih-alih memberikan informasi yang mencerahkan publik, media massa justru kerap dianggap menjadi sumber masalah baru. Ini karena media massa pada umumnya lebih sering mencari sisi dramatis bencana dan krisis dengan pendekatan berita buruk adalah berita baik. Media juga kerap dianggap mengabaikan etika dalam peliputan dan pelaporannya sehingga justru memicu bencana baru dalam pemberitaannya. Aspek mitigasi yang seharusnya bisa mendorong kesiapsiagaan warga jarang diberitakan. Ini terjadi karena dasar-dasar pelaporan yang baik yang merupakan kunci untuk pelaporan bencana dan krisis sering diabaikan.<sup>4</sup>

Di sisi lain, pekerja media kerap menjadi korban bencana. Hal ini terjadi karena banyak pekerja media tidak memahami risiko dalam peliputannya, sementara perusahaan media juga abai memberikan dukungan yang dibutuhkan. Misalnya, dalam bencana bumi dan tsunami Aceh tahun 2004, setidaknya 25 pekerja media meninggal dunia atau hilang. Ini merupakan jumlah kematian terbanyak yang dialami pekerja media di Indonesia dalam satu kejadian.<sup>5</sup>

4 Ahmad Arif dalam *Jurnalisme Bencana Bencana Jurnalis*, KPG, 2010

5 Ibid

Berikutnya, satu wartawan televisi hilang dan satu lainnya meninggal di rumah sakit karena tenggelam saat meliput evakuasi terbakarnya KM Levina pada 2007. Berikutnya, satu wartawan meninggal saat meliput letusan Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2010. Pada tahun 2014, seorang wartawan meninggal dunia karena erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terbaru, dalam peliputan Covid-19, puluhan wartawan telah terinfeksi dan sebagian di antaranya telah meninggal dunia. Situasi ini menunjukkan, wartawan di Indonesia sangat rentan terdampak bencana.



Doc. Save the Children Indonesia

## Pendahuluan

### Pentingnya Pedoman Perilaku bagi Jurnalis

Media telah diakui sebagai elemen penting dalam demokrasi. Media dapat mempengaruhi keputusan politik, mengubah sikap publik dan, tentu saja, menyelamatkan nyawa dalam bencana. Seperti disebutkan UNDRR, selama tiga dekade terakhir, media massa telah membantu membuat perubahan dramatis di masyarakat terkait sikap terhadap minum, merokok, diet, HIV dan AIDS dan lingkungan. Peran serupa diharapkan dari media dalam mendorong pengurangan risiko bencana.<sup>6</sup>

Namun demikian, tantangan saat ini semakin berat. Dunia informasi kini mengalami disrupsi seiring dengan menguatnya media sosial dan semakin terpinggirkannya media massa. Hal ini telah mempengaruhi kondisi ekonomi di banyak media, dan berikutnya berdampak pada kualitas peliputan, termasuk dalam peliputan bencana. Banyak media yang terjebak pada persaingan menarik pembaca atau penonton dengan mengorbankan kualitas liputan mereka.

Pandemi Covid-19 kali ini menyingkap mengenai peran pentingnya media massa bagi publik. Mereka dituntut dapat menyaring kekacauan, memilah fakta dari yang palsu, dan menyampaikan informasi dengan cara yang tepat, akurat, sensitif, dan enak kepada publik. Berita seputar

6 [https://www.unisdr.org/files/20108\\_mediabook.pdf](https://www.unisdr.org/files/20108_mediabook.pdf)

virus yang salah dan klaim pengobatan palsu, bisa membahayakan publik. Contoh kasus: lebih dari 40 orang mengonsumsi alkohol beracun di Iran, percaya pada informasi yang salah bahwa alkohol akan membantu mencegah infeksi virus corona. Jelas, meliputi bencana dan krisis, termasuk pandemi Covid-19 seperti saat ini, merupakan tantangan besar bagi media. Karenanya, mereka harus dibekali pengetahuan yang benar agar informasi yang disampaikan tidak malah memicu bencana dan masalah baru. Di Indonesia, klaim penyembuhan dan obat-obat palsu ini juga banyak diamplifikasi media sosial, dan media massa dituntut untuk lebih hati-hati dan memberikan informasi yang memandu publik keluar dari krisis.

Selain substansi dalam penyediaan informasi, banyaknya wartawan yang menjadi korban bencana juga menjadi alasan penting bagi penyusunan panduan peliputan guna mengurangi risiko. Dengan latar belakang inilah pedoman perilaku dalam peliputan bencana dan krisis ini disusun. Pedoman ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi pekerja media di Indonesia dalam meliput, sehingga menghasilkan karya yang berkualitas dan sekaligus aman.

Pedoman perilaku dalam peliputan bencana dan krisis ini meliputi dua hal utama, yaitu tentang bagaimana meliput yang aman, dan kedua masyarakat bisa aman dari peliputan media. Aman dari peliputan media dimaksudkan agar peliputan bencana dan krisis tidak memicu bencana atau krisis menjadi lebih dalam. Media memiliki tanggungjawab untuk turut menjaga lingkungan dan komunitasnya melalui bencana dan krisis dengan prinsip meminimalkan korban maupun kerugian.

## Prinsip Dasar

Pedoman perilaku merupakan serangkaian prinsip dan arahan untuk anggota kelompok profesi media. Pedoman Perilaku Peliputan Bencana dan Krisis ini disusun untuk mencegah terjadinya pemberitaan yang justru bisa memperdalam dampak bencana dan krisis.

## Ruang Lingkup

Dengan mengikuti Pedoman Perilaku Peliputan Bencana dan Krisis ini, para pekerja dan media massa, diharapkan bisa mencegah terjadinya penyimpangan dalam peliputan sehingga memicu dampak sosial yang lebih besar bagi penyintas, dan publik lebih luas.

## Pra Bencana dan Krisis

Pada fase sebelum bencana dan krisis, para jurnalis harus mempelajari dasar-dasar kebencanaan, misalnya apa saja istilah yang ada pada bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan atas kontribusi manusia. Jurnalis perlu melakukan riset terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan meliput bencana. Begitu pula dengan perusahaan media juga perlu memberikan *training* bagi jurnalisnya sebelum ditugaskan ke lapangan meliput bencana. Jurnalis harus dibekali kecakapan *survival* selama di lapangan. Jurnalis harus memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar sebelum turun ke lapangan meliput bencana dan krisis.

Hal ini penting supaya tidak terjadi kesalahan fatal saat memberitakan bencana dan krisis yang terjadi. Sebab, kesalahan dalam memberitakan situasi dan kondisi bencana memiliki dampak

sosial terhadap masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Kasus-kasus kesalahan jurnalis dan media massa dalam memberitakan bencana perlu menjadi pelajaran. Contoh kasus seorang reporter salah satu stasiun televisi swasta nasional tak bisa membedakan suhu panas atau hujan abu dengan awan panas saat peristiwa erupsi gunung Merapi di Yogyakarta pada November 2010 silam. Akibat kesalahan pemberitaan tersebut terjadi kepanikan di masyarakat, bahkan seorang warga meninggal tertabrak truk karena panik. Kemudian kesalahan lainnya, reporter salah satu stasiun televisi salah menyebut hujan abu vulkanik sebagai *whedus gembel*. Padahal *whedus gembel* adalah istilah lokal masyarakat di sekitar Gunung Merapi menyebut awan panas, bukan hujan abu vulkanik. Kesalahan menyebut *whedus gembel* menyebabkan kepanikan warga sekitar Gunung Merapi dan Yogyakarta.

Kasus terbaru seperti kesalahan jurnalis dan media memberitakan mengenai tanaman herbal sebagai obat virus Covid-19 oleh orang yang mengklaim diri sebagai pakar. Demi menarik pembaca dan penonton sebanyak-banyaknya media mengabaikan verifikasi dan validasi yang ketat terkait klaim-klaim tanaman herbal tersebut, sehingga menimbulkan disinformasi di masyarakat. Pemberitaan pun bisa berdampak pada penurunan kewaspadaan atas bahaya penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, dituntut kesadaran jurnalis untuk meningkatkan pengetahuan seputar kebencanaan. Sudah menjadi syarat bagi jurnalis untuk banyak-banyak menggali dan mengumpulkan data dan berdiskusi dengan pegiat dan ahli. Diharapkan jurnalis dan media massa memberitakan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan krisis.

## Saat Terjadi Bencana

Saat terjadi bencana dan krisis, jurnalis harus melakukan riset terlebih dahulu, mempelajari situasi dan kondisi di lokasi bencana dan krisis. Kemudian juga perlu mempelajari kultur sosial masyarakat setempat. Hal ini penting sebagai bekal pengetahuan dasar bagi jurnalis yang hendak turun ke lapangan untuk meliput kejadian.

Berikutnya jurnalis harus menggunakan perlengkapan untuk pelindung dan keamanan diri yang standar untuk turun ke lapangan. Misalnya perlengkapan P3K, kostum sesuai standar seperti sepatu, sarung tangan, masker, atau alat pelindung diri (APD) lainnya berdasar kebutuhan. Yang tak kalah penting adalah jurnalis perlu menyiapkan logistik untuk kebutuhan pribadi selama di lokasis bencana dan krisis. Semua kebutuhan perlengkapan pribadi liputan itu harus disediakan dan dibantu oleh perusahaan media tempat jurnalis bekerja.

Jangan sampai jurnalis saat meliput di lokasi bencana tidak menggunakan peralatan dan pelindung diri yang standar, sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Belajar dari peristiwa bencana dan krisis yang terjadi di beberapa daerah sebelumnya, tak sedikit jurnalis yang datang ke lokasi kejadian tanpa dibekali perlengkapan yang memadai. Sehingga tak jarang jurnalis di lapangan justru menjadi korban baru di tengah situasi bencana dan krisis. Sebagai contoh tragedi Tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu, sejumlah jurnalis media online dari Jakarta berangkat ke lokasi bersama rombongan relawan dan aparat TNI tanpa perlengkapan pribadi. Bahkan ada yang datang ke lokasi bencana hanya pakaian di badan tanpa bawa baju ganti dari Jakarta ke Palu. Tidak heran selama beberapa hari jurnalis tersebut tak ganti pakaian dan terserang penyakit.

Selain itu, di lapangan jurnalis mengutamakan keselamatan diri ketimbang memburu berita. Baik itu ketika meliput saat terjadi bencana vulkanologi seperti erupsi gunung merapi, gempa bumi, longsor, banjir bandang, maupun bencana non alam seperti wabah seperti pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Pasalnya masih banyak jurnalis yang mengabaikan keselamatan diri saat meliput saat terjadi bencana dan krisis. Yang terbaru sejumlah jurnalis terinfeksi positif Covid-19, rata-rata terpapar saat meliput di lapangan karena tidak disiplin menerapkan Protokol Kesehatan.

Berikutnya jurnalis perlu mengedepankan jurnalisme sensitif bencana. Tidak mendramatisir situasi yang terjadi di tempat bencana, misalnya menghindari pengambilan gambar dan video yang ekstrim (warga yang berdarah-darah). Kemudian menghindari mewawancarai anak dalam kondisi trauma.

## **Pasca Bencana**

Jurnalis dan media memiliki peran signifikan dalam membangun dan mengembalikan semangat para korban setelah bencana melanda. Oleh karena itu, jurnalis dan media diharapkan mengedepankan pemberitaan yang mendorong rehabilitasi. Jurnalis dan media massa menghindari pemberitaan yang berpotensi menimbulkan traumatik bagi korban bencana. Dibutuhkan lebih banyak pemberitaan indepth reporting atau liputan mendalam, kisah human interest dan transparansi penanggulangan bencana.

## Kelompok Sasaran

Panduan Peliputan Bencana dan Krisis ini diharapkan bias menjadi pedoman untuk membangun dan menjaga profesionalitas jurnalis. Sehingga jurnalis aman, keselamatan terjamin saat meliput peristiwa bencana dan krisis.

## Profesional Jurnalis

Kesadaran jurnalis masih minim akan pentingnya Alat Pelindung Diri (APD) atau perlengkapan sesuai standar saat meliput ke wilayah bencana dan krisis. Sehingga tak jarang jurnalis turun ke lapangan meliput ke lokasi bencana dan krisis tanpa menggunakan APD. Terlebih kondisi kontributor atau jurnalis lepas yang seolah “dianak tirikan” oleh perusahaan media tempatnya bekerja. Jurnalis lepas ini selain upah mereka dibayar per berita yang tayang, banyak dari mereka tak mendapatkan perlengkapan atau APD dari perusahaan media tempatnya bekerja saat ditugaskan ke lapangan.

Kebakaran besar lahan dan hutan (Karhutla) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada Juni 2019 lalu menelan banyak korban di masyarakat, karena kabut asap beracun itu mengakibatkan banyak warga mengidap penyakit ISPA, sesak pernafasan. Peristiwa yang berdampak besar terhadap publik itu mendorong para jurnalis untuk turun ke lapangan meliput kondisi ke lapangan. Seorang jurnalis foto di Aceh mendapat penugasan dari editor media tempatnya bekerja untuk turun ke lapangan memotret kondisi *hot spot*, titik api secara langsung. Sang jurnalis foto yang berstatus kontributor itu pun bergegas langsung berangkat ke lokasi tanpa perlengkapan APD yang standar untuk keamanan dan keselamatannya. Bahkan ia hanya mengenakan sandal jepit langsung berangkat ke titik api untuk mendokumentasikan kejadian. Ia tak dibekali masker, helm, sarung tangan, P3K dan perlengkapan lainnya dari perusahaan tempatnya bekerja.

Dampaknya setiba di lokasi titik api yang berada di tengah hutan, jurnalis foto yang bersangkutan terjebak. Akhirnya dengan bersusah payah, tim SAR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berhasil mengevakuasi sang jurnalis tersebut.

Berikutnya, peristiwa banjir besar pada 2 Februari 2020 lalu di sejumlah wilayah Jabodetabek, banyak jurnalis tidak dibekali perlengkapan saat meliput. Bahkan warga protes saat perahu karet petugas BPBD untuk mengevakuasi warga di Perumahan Ciledug Indah, Tangerang dipenuhi oleh reporter dan juru kamera sehingga proses evakuasi dan pengiriman bantuan logistik warga korban banjir jadi terganggu.

Dua kasus di atas harus menjadi pelajaran bagi para jurnalis dan media massa, bahwa perlengkapan dan APD saat meliput bencana dan krisis itu sangat penting. Perlengkapan sesuai standar wajib dimiliki para jurnalis saat turun ke lapangan meliput bencana dan krisis. Jangan sampai minimnya peralatan jurnalis di lapangan membahayakan keselamatan diri dan orang lain.

Yang tak kalah penting diperhatikan oleh jurnalis adalah sensitif pada kelompok rentan. Kelompok rentan dalam hal ini ada anak-anak/remaja, perempuan, lanjut usia dan disabilitas. Jangan sampai peliputan media justru memicu bencana baru dan menambah kerentanan komunitas.

Pemberitaan media yang tidak sensitif kelompok rentan seperti anak dan remaja korban bencana dan krisis berdampak buruk terhadap mereka. Misalnya ancaman *human trafficking* atau perdagangan manusia korban bencana. Pada pertengahan Oktober 2018 silam, Pemerintah Kota Makassar menggagalkan aksi agent perdagangan anak korban tsunami Palu yang mengungsi di Makassar.

Maka dari itu, jurnalis dan media harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari pemberitaan terhadap kelompok rentan. Misalnya menghindari menyebutkan identitas anak secara detail, tak mewawancarai anak secara langsung tanpa pendampingan psikolog atau pendamping dan tak menampilkan wajah anak-anak korban bencana.



Doc. Save the Children Indonesia

# Tantangan Peliputan Bencana di Indonesia

Peristiwa Tsunami di Aceh pada 2004 memakan korban 25 pekerja media. Di peristiwa lainnya, wartawan juga kerap menjadi korban. Namun soal keamanan dalam melakukan peliputan ini tidak pernah menjadi perhatian, sementara jurnalis terus mendapat kritik dalam peliputan bencana.

Itu sebabnya, panduan dalam meliput bencana yang menjadi penting. Aspek keamanan jurnalis harus diperhatikan seiring dengan upaya menjaga kualitas jurnalistik. Buku panduan meliput bencana diharapkan dapat memperkecil resiko menjadi korban saat bertugas seraya mempertahankan kualitas jurnalistik. Pasalnya, bukan hanya keberadaan *buzzer*, kualitas jurnalistik yang buruk juga membuat kepercayaan publik terhadap media profesional menjadi berkurang.

Buruknya karya jurnalistik bukan hanya karena rendahnya pemahaman jurnalis terhadap etika jurnalistik. Industri media *online* saat ini terus bersaing mencari *click* dengan segala cara untuk mengoptimalkan *search engine*.

Persaingan itu bahkan tidak hanya dilakukan antar media. Jurnalis Detik.com, Erwin Dariyanto menjelaskan, persaingan serupa terjadi di antara kanal-kanal yang ada di media. Ketika kanal *news*, kanal politik, kanal *entertainment* sedang terus menerus menulis berita soal banjir dan mendapat banyak *click*, kanal akan “mati angin.” Itulah sebabnya, kemudian ada berita-berita yang mengaitkan antara banjir dengan artis – sesuatu yang seringkali tidak memiliki kaitan.

“Dan itu bukan hanya saat bencana. Pernah suatu ketika Pak Wiranto (mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) mengalami penusukan, tiba-tiba teman-teman di *lifestyle* menulis momen itu dengan menyoroti mobil yang dikendarai Wiranto saat tertusuk. Sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya,” kata dia.

Jurnalis Liputan6.com, Andry Haryanto, menekankan buku panduan memang harus mencakup aspek teknis dan etik yang perlu dipahami redaksi. Tujuannya, agar para jurnalis di lapangan yang meliput tidak tetap bekerja sesuai hasil *briefing* redaksi dan tidak membuat berita yang dapat menyinggung kelompok-kelompok rentan di sekitar bencana.

“Misalnya, kita tidak meliput yang berlebihan, atau tentang wanita dan anak. Tapi dalam kenyataannya, media kita perlu itu karena orang-orang di Google mencari itu. Nah, kita sudah membuat batasan,” kata Andri.

Untuk aspek teknis, jurnalis yang menjadi kontributor media nasional di Sulawesi Selatan, Qodriansyah Agam Sofyan, menceritakan pengalamannya. Bagi Agam, menjadi jurnalis-kontributor di Indonesia seperti ‘pemain kelas dua’. Artinya, kesejahteraan dan keselamatannya tidak terlalu dipikirkan. Namun sialnya, dia harus mendapatkan konten ‘kelas satu’ untuk mediana.

“Yang terjadi kepada diri saya pribadi adalah, ya sudah, *loe* kalau mau punya duit, ya, *loe* berkarya. Apapun yang terjadi.” Kata dia.

Beberapa waktu lalu, misalnya, Sulawesi Selatan mengalami banjir tepatnya di Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto. Itu terjadi di saat pandemi COVID-19 belum membaik. Agam harus meliput banjir tersebut dan dituntut untuk datang ke lokasi. Dia mengaku terpaksa mengabaikan seluruh keselamatan asal mendapatkan bahan berita.

Mediana sama sekali tidak membekali apapun untuk keselamatannya.

Yang bisa diandalkan hanyalah sinergitas sesama jurnalis. Agam baru mendapatkan Alat Pelindung Diri dari organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.

Tetapi tak cukup sampai di situ. Dalam meliput bencana, jurnalis di daerah kerap mendapat intimidasi. Agam mengatakan, ketika diketahui penyebab banjir itu adalah adanya eksploitasi hutan, maka dia harus berhadapan dengan preman-preman perusahaan. Media yang mempekerjakannya sebagai kontributor pun tidak pernah memikirkan hal ini.

“Sering terjadi kami dikejar parang, mau di-*sniper* dan sebagainya, sudah kami diskusikan dengan media dia punya kantor. Ya dia bilang, kamu mahir-mahir aja bagaimana mendapatkan sebuah konten atau tim Jakarta yang datang,” kata Agam.

Kedatangan ‘tim Jakarta’ tentu bukan kabar baik baginya. Sebab, jika peliputan tersebut dilakukan oleh ‘tim Jakarta’, dia tidak mendapatkan penghasilan. Inilah kondisi yang dialami kontributor berita untuk televisi nasional di Indonesia.

Bagi jurnalis daerah, bencana memang memiliki sisi baik secara ekonomis. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Sebab, jurnalis di daerah mendapat penghasilan dari seberapa banyak berita yang dia kontribusikan kepada mediana. Karena itu, bencana di daerah yang dapat dia akses, bisa memberikan penghasilan lebih.

Jurnalis asal Padang, Aidil Ikhlas, menjelaskan bahwa jurnalis daerah kemungkinan besar tidak akan berangkat ke lokasi bencana yang jaraknya jauh, jika diperkirakan hanya bisa menghasilkan satu berita. Umumnya, satu berita televisi akan dibayar seharga Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Dia butuh mengeluarkan biaya operasional lebih besar dari itu. Sebaliknya, jika dapat diperkirakan bahwa suatu bencana bisa menghasilkan lebih dari dua berita, dia akan menyanggupinya.

Hal tersebut sering kali tidak dipahami oleh jurnalis-jurnalis di Jakarta yang menggunakan jasanya. Aidil mengatakan, kordinator liputannya yang berada di Jakarta tidak memahami medan sehingga

tidak bisa memperkirakan jarak dan kondisi yang bakal dilalui kontributornya. Lebih dari itu, para kontributor pun tidak mendapat bekal peralatan untuk menjaga keselamatan.

“Mereka enggak tau kalau di sini tuh, jalannya, bahkan sepanjang jalan menuju bencana itu juga ancaman bagi kami. Terus karena kita itu tidak dibekali apapun, kecuali yang memang udah karyawan, itu udah pandai-pandai kita,” kata dia.

Sebenarnya, pengabaian keselamatan terhadap jurnalis tidak hanya dilakukan terhadap jurnalis daerah. Media massa di Jakarta pun, kerap tidak acuh kepada para jurnalisnya di Ibu Kota. Pada saat bencana tsunami di Pandeglang pada 2018, misalnya, jurnalis Suara.com Erick Tandjung mengatakan, kebanyakan jurnalis di Jakarta yang meliput ke lokasi kejadian tidak membawa bekal APD yang memadai. Banyak dari mereka bahkan tidak membawa apapun.

“Banyak problem terjadi di lapangan. Ternyata, teman-teman (dari Jakarta) di lapangan itu banyak yang tidak bawa bekal apa-apa. Ada beberapa yang sakit karena tidak bawa jaket, tidak ada masker, tidak ada sarung tangan, tidak ada persiapan.” kata dia.

## **Pra-bencana**

Dari permasalahan di atas, dapat disimpulkan, jurnalis berada dalam kondisi rentan dalam melakukan kerja peliputan bencana sehingga berpotensi menjadi korban. Jurnalis Tempo Banyuwangi, Ika Ningtyas, menyimpulkan semua masalah peliputan bencana cenderung lebih banyak pada aspek pra-bencana yang di antaranya, meliputi aspek persiapan untuk mencegah terjadinya resiko (mitigasi).

Menurut Ika, sangat diperlukan panduan meliput bencana yang didalamnya secara rinci menjelaskan aspek-aspek pra-bencana untuk

meliput, bahkan sampai ke dampak bencana ekologi. Para jurnalis pun perlu dibekali pengetahuan kebencanaan, jenis-jenis bencana, aspek safety, dan bagaimana menulis peristiwa bencana alam.

Dalam hal penulisan berita, diperlukan penekanan mengenai pentingnya pengetahuan jurnalis yang melek jender dan juga inklusi terhadap kelompok rentan. Hal ini diperlukan agar kebutuhan spesifik korban perempuan, anak, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, dapat diketahui publik.

Informasi hoax yang beredar di media juga menjadi soal. Beberapa waktu lalu misalnya, salah satu stasiun TV nasional memberi panggung untuk pembahasan teori konspirasi. Penyebaran teori konspirasi ini berdampak buruk pada penanganan bencana. Banyak orang yang memilih untuk tidak percaya COVID-19 karena adanya informasi mengenai teori konspirasi tersebut.

Lebih dari itu, para jurnalis juga memerlukan pelatihan-pelatihan meliput di saat krisis dan bencana. Pelatihan ini harus dilakukan secara intens karena setiap bencana alam memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Jurnalis CNNIndonesia TV, Irvan Imamsyah berpendapat, barangkali penting dibuat sistem sertifikasi tertentu untuk meliput krisis dan bencana, termasuk juga meliput perang. Sistem ini berlaku di luar negeri. Menurut Irvan, sertifikat akan sangat membantu redaksi dalam hal memberi tugas kepada jurnalis.

“Jadi memang ada wartawan-wartawan dengan spesifikasi tertentu yang kita yakini dia akan bisa garap liputan perang Suriah, bencana, dan lainnya,” kata dia.

Sistem sertifikasi ini setidaknya dapat menjadi ukuran kapasitas seorang jurnalis dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik. Dalam sistem

tersebut, tentu saja perlu diukur juga seberapa besar keberaniannya, bagaimana kondisi mentalnya, untuk mendapat sertifikat meliput di wilayah-wilayah beresiko.

Namun sejauh belum ada sistem sertifikasi, menurut Irvan, sudah sepatutnya membuat ukuran sendiri untuk mencari bakat-bakat seseorang yang mampu bertugas di wilayah beresiko. Di CNN, ada seseorang yang dipercaya untuk meliput bencana. Setiap ada peristiwa, orang itu selalu mendapat tugas. Tentu juga dibekali dengan *briefing* untuk keamanan serta APD yang memadai.

Dengan demikian, orang itu memiliki kepercayaan diri dan antusiasme. Sebab, dia bakal mendapat kepercayaan penuh setiap ada bencana.

Irvan mengatakan, meskipun belum ada acuan yang baku, hal-hal seperti itu terus dilakukan dan disempurnakan. Mediannya sudah mulai membuat protokol kerja. Dalam masa COVID-19, para jurnalis diminta harus menggunakan sarung tangan karet saat meliput, menggunakan masker, dan mengonsumsi vitamin yang disediakan kantor.

Kebutuhan meliput para jurnalis di lapangan juga terus dipikirkan. Misalnya, saat meliput di zona merah, orang itu harus diberikan hak untuk isolasi mandiri. Disediakan tempat tinggal yang nyaman dan sehat. Itu tawar menawar yang mestinya ada di redaksi.

“Mereka (para jurnalis di lapangan) kan mata telinga dan hidung redaksi di lapangan. Jadi mereka yang tahu kondisinya seperti apa. Ambisi-ambisi perusahaan dan *news gathering* yang ingin lebih depan dan terdahulu bisa melebur dengan kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Yang terpenting, kita *concern* keamanan,” katanya.

## Penanganan

Selain pelatihan dan penguatan aspek pra-bencana dalam buku panduan meliputi bencana, jurnalis Jakartapost Kharishar Kahfi memandang, sistem pemulihan mental untuk para jurnalis peliput bencana juga diperlukan. Sebab, setelah bekerja di tengah bencana, mental akan terkena dampak. Setidak-tidaknya, produktivitas akan menurun. “Kesehatan mental yang baik akan jadi aset terbaik itu,” katanya.

Koordinator daerah CNNIndonesia TV, Irvan Imamsyah, menceritakan ada jurnalis yang menjadi korban ketika melput di tengah pandemi COVID-19. Jurnalis itu langsung dinonaktifkan sampai dapat dipastikan sehat. Redaksi mengawal pemulihan itu serta menanggung biaya pemulihannya.

Irvan melanjutkan, ada asuransi untuk menjaga kesehatan jurnalisnya. HRD medianya juga menyediakan sistem *reimbursement* jika ada pengobatan yang tidak dapat diselesaikan dengan asuransi.

Selain itu, redaksi juga melakukan pelacakan secara mandiri. “Itu kita langsung bikin klaster siapa aja kru yang berdekatan dengan dia dan bersentuhan dengan yang positif, kita bikin klaster. Mereka semua sempat tidak boleh masuk, isolasi mandiri, dan sebagainya,” kata Irvan.

Redaksi juga secara aktif membayar konsultan untuk mengantisipasi adanya virus di peralatan kerja mereka. Salah satu hasilnya, seluruh alat dibersihkan dengan vakum dan disinfektan. Hal-hal semacam ini yang perlu ada dalam buku panduan meliputi bencana.

## Kewajiban Perusahaan Media

Perusahaan media wajib membekali jurnalis yang ditugaskan meliput ke lokasi bencana dan krisis dengan APD dan perlengkapan lengkap. Kemudian yang tak kalah penting, perusahaan harus menyediakan asuransi jiwa. Berikutnya memperhatikan dan mempertimbangkan keselamatan jurnalis saat memberikan penugasan ke lapangan. Jika terlalu beresiko untuk keselamatan jurnalis dan orang lain, perusahaan membatalkan atau menunda penugasan jurnalisnya ke lapangan.

Sebagai contoh, saat terjadi bencana tsunami atau gunung meletus, perusahaan media tidak menugaskan jurnalisnya untuk meliput langsung ke lokasi, sebab bisa membahayakan nyawa. Begitu pula dengan bencana non alam seperti wabah, pandemi Covid-19. Masih banyak perusahaan media yang menugaskan jurnalisnya untuk meliput ke lokasi zona merah di tengah bahaya penyebaran Covid-19. Demi menarik pembaca dan penonton, media massa mengabaikan keselamatan jurnalis.



Doc. Save the Children Indonesia

## Pelaksanaan

Sosialisasi pedoman perilaku secara rutin diberikan kepada kelompok sasaran untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi bahaya dari penyimpangan dalam meliput bencana dana krisis.



# BAB III Pedoman Keamanan dan Peliputan

Bagian ini berisi dua hal utama, yang meliputi pedoman keamanan dan pedoman peliputan. Pedoman keamanan meliputi upaya yang perlu dipersiapkan sebelum, saat, dan sesudah melakukan peliputan agar bisa berjalan lancar dan aman. Sedangkan pedoman peliputan terutama meliputi aspek-aspek substantif dalam peliputan bencana dan krisis.

## Pedoman Keamanan

Bencana alam skala besar biasanya menghancurkan infrastruktur vital seperti akses jalan, listrik, jaringan air minum, hingga telekomunikasi. Ini menyebabkan medan bencana cenderung memiliki daya dukung hidup yang terbatas dan ketidakpastian. Dalam banyak kejadian, situasi ini kemudian memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari penjarahan hingga kekacauan. Ini misalnya terjadi dalam bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 lalu, yaitu terjadinya kelangkaan bahan makanan dan penjarahan.

Padahal, bencana merupakan salah satu peristiwa yang dianggap memiliki nilai berita tinggi. Karena itu, jurnalis di tempat bencana biasanya dituntut untuk tetap bekerja. Padahal, kerap kali mereka harus berhadapan dengan kondisi yang berbahaya baik bagi diri maupun keluarga. Dalam kasus tsunami Aceh 2004, setidaknya 25 pekerja media hilang atau meninggal dunia, yang menunjukkan bahwa jurnalis juga sangat berisiko. Tingkat kerentanan ini bisa berbeda-beda di tiap daerah, namun secara umum, kondisi Indonesia yang berada di Zona Cincin Api,



Doc. Save the Children Indonesia

memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Oleh karena itu, menjadi sangat penting wartawan, terutama yang tinggal di zona bahaya, mendapatkan bekal mengenai ancaman bahaya di sekitar mereka, termasuk bagaimana mengelola risiko dan menyiapkan rencana tanggap darurat. Perusahaan media, seharusnya memastikan pekerjanya, termasuk wartawan, mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai hal ini. Wartawan dalam hal ini juga termasuk para kontributor, yang sering kali tinggal di daerah-daerah yang berisiko. Dan begitu terjadi bencana, keselamatan pekerja media harus menjadi prioritas.

Risiko bencana juga bisa dialami para jurnalis dari luar daerah atau dari kantor pusa yang diterjunkan ke lokasi bencana di fase-fase awal kejadian. Seperti kita ketahui, bencana alam yang berulang kali melanda biasanya menimbulkan kondisi penuh ketidakpastian dan keterbatasan. Namun, banyak kisah wartawan Indonesia yang ditugaskan ke medan bencana di fase-fase awal ini tidak dibekali dengan persiapan memadai, baik secara teknis maupun logistik.<sup>7</sup> Sebagian yang dikirim juga baru menjadi wartawan, yang belum memahami kompleksitas peliputan. Padahal, peliputan bencana merupakan salah satu yang paling sulit, karena jurnalis harus menghadapi medan yang tidak mudah, ketidakpastian, ancaman bahaya susulan, selain juga menghadapi penyintas yang dalam kondisi psikologis tertekan.

Dampaknya, selain mengancam keselamatan wartawan yang ditugaskan, hal ini juga kerap kali menghambat kinerja. Tanpa dukungan telepon satelit misalnya, wartawan yang diterjunkan ke medan bencana seperti saat gempa Palu 2018, gempa Mentawai 2010, atau tsunami Aceh 2004, akan sulit mengirimkan berita. Tanpa dukungan logistik, wartawan yang ditenarkan di medan bencana di fase-fase awal ini juga bakal kesulitan makan dan minum, sehingga harus memanfaatkan sumber daya yang seharusnya untuk korban bencana.<sup>8</sup>

---

7 Pengalaman ini misalnya dikisahkan salah satu peserta diskusi terpusat, wartawan baru yang harus berangkat ke lokasi gempa Palu, Sulawesi Tengah, 12 jam usai gempa terjadi. Ia berangkat tanpa bekal, tanpa perlengkapan dan tanpa makanan. Bermodal baju di badan dan ponsel di tangan,

8 Kisah ini banyak disampaikan wartawan yang ditugaskan di daerah bencana, termasuk Palu pada 2018, seperti yang dituturkan salah satu informan diskusi.

Bahkan, fase-fase awal bencana juga bisa sangat berbahaya. Misalnya, salah satu wartawan televisi swasta yang sempat dikabarkan hilang kontak saat meliput bencana tsunami di Mentawai, Sumatera Barat tahun 2010 silam. Jurnalis televisi ini bersama timnya awalnya hendak meliput ke pulau terpencil di wilayah Kepulauan Mentawai. Namun, perahu yang ditumpanginya justru tersapu ombak dan gelombang tinggi, sehingga ia bersama tim terdampar di salah satu pantai. Tanpa sinyal telekomunikasi, tanpa logistik dan makanan. Hilangnya kontak ini membuat heboh di posko penanggulangan bencana saat itu. Sumber daya yang seharusnya dikerahkan untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pengiriman bantuan untuk korban tsunami, sebagian dialihkan mencari Anggia dan tim jurnalis TV yang dikabarkan hilang itu.

Kisah ini hanya sedikit cerita dari banyaknya jurnalis yang liputan bencana yang justru menjadi obyek berita. Kisah mereka pantas disyukuri karena berhasil selamat saat liputan dari lokasi bencana. Namun ada juga cerita jurnalis yang tak bisa selamat dari bencana, seperti jurnalis yang tenggelam saat meliput bangkai kapal KMP Levina di perairan Jakarta tahun 2007 silam. Kemudian meninggalnya jurnalis saat meliput bencana meletusnya gunung Merapi di Yogyakarta 2020, dan letusan Gunung Sinabung pada 2016.

Belajar dari sederet peristiwa inilah, pedoman jurnalis meliput bencana penting untuk diwujudkan. Selain sebagai panduan untuk jurnalis di lapangan, pedoman ini juga penting untuk memperkuat peran jurnalis untuk kemanusiaan. Bagaimanapun misi terbesar jurnalis adalah, menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Dan salah satu kepentingan publik itu adalah misi kemanusiaan, bukan sekadar bisnis atau penyajian informasi belaka.

## Tahapan Prabencana

### ■ Pengetahuan dasar tentang bencana

Pembahasan di bab ini fokus mengenal bencana. Jurnalis mesti memahami kapan peristiwa tersebut dikategorikan sebagai bencana. Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang masuk kategori bencana adalah; peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Artinya, peristiwa yang mengancam penghidupan masyarakat termasuk dalam kategori bencana, baik karena alam maupun ulah manusia. Selanjutnya mari mengenali bentuk bencana. Mulai dari bencana alam seperti; gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. Ada juga bencana nonalam seperti peristiwa gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit dan juga bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial, antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, bahkan teror.

Kategori bencana yang sangat luas ini membuat penyusunan standar generik liputan bencana tidaklah mudah. Maka itu pengenalan dan pengetahuan dasar bencana mesti dipahami oleh setiap jurnalis, tidak harus jurnalis yang meliput bencana. Pengetahuan tentang bencana dan risikonya di tiap daerah ini tidak hanya jadi bekal dalam peliputan, tetapi seharusnya juga bagi keselamatan jurnalis dan keluarganya. Belajar dari

meninggalnya jurnalis dalam sejumlah kejadian bencana di Indonesia, wartawan perlu memahami karakter dan bencana ini untuk memetakan risikonya, dan menjadi dasar bagi mitigasi bencana.

Begitu terjadi bencana, perusahaan media juga harus mendahulukan keselamatan jurnalis dan keluarga mereka yang ada di zona bahaya, sebelum menugaskan untuk kerja-kerja jurnalistik. Jika kemudian ada penugasan wartawan dari daerah lain atau dari kantor pusat untuk membantu peliputan di daerah tersebut, wartawan bersangkutan harus dipilih yang memiliki kapasitas dan pengalaman cukup, atau setidaknya sudah pernah mendapatkan pelatihan dalam peliputan bencana. Wartawan ini juga harus dibekali dengan logistik memadai, serta alat-alat keselamatan diri, selain daya dukung untuk bekerja.

Jika merujuk UU Penanggulangan Bencana, aktifitas penanggulangan bencana terdiri dari mitigasi atau pencegahan atau pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan serta kegiatan peringatan dini bencana. Namun, banyak jurnalis lebih banyak menulis soal penyelamatan dan evakuasi korban atau peristiwa setelah bencana terjadi.

Selain penanggulangan bencana, yang tak kalah penting adalah proses pasca bencana seperti rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses rehabilitasi dan konstruksi harus mempertimbangkan ancaman dan risiko bencana yang bisa datang karena kondisi seperti geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, budaya, politik, ekonomi maupun teknologi. Begitu pula dengan dampak bencana yang tak hanya menimbulkan kematian, luka, atau sakit. Dampak lainnya adalah hilangnya rasa aman, adanya pengungsian, kerusakan atau kehilangan harta, gangguan kegiatan masyarakat dan krisis sosial lainnya. Namun risiko tentu bisa diminimalisir jika proses mitigasi dilakukan dari awal.

Hal yang lain tak kalah penting untuk dipahami jurnalis adalah, mengenal skala bencana yang biasanya berpedoman kepada jumlah korban jiwa serta besarnya dampak kerusakannya. Pengetahuan soal status bencana menjadi bencana nasional dan daerah ini penting diketahui untuk mengukur dampaknya. Selain itu, jurnalis mesti memahami institusi yang terlibat dalam penanganan bencana. Mulai dari keterlibatan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Sar Nasional (Basarnas), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), termasuk relawan dan ormas yang bergerak di bidang kebencanaan



Doc. Save the Children Indonesia

## ■ Pelatihan Jurnalis Bencana dan Krisis

Bencana merupakan peristiwa yang sulit ditebak. Dia hadir tiba-tiba tanpa mengucapkan salam selamat datang. Begitu pula dengan jurnalis yang juga mesti menyambutnya tanpa mengucapkan selamat datang. Dalam kondisi itu, jurnalis dituntut untuk bekerja untuk menyajikan informasi ke publik. Sebelum bencana datang, jurnalis mesti memahami risiko dan ancaman jika meliput bencana tersebut.

Contoh, risiko meliput bencana wabah Covid-19 yang berbeda dengan risiko meliput kapal tenggelam. Begitu juga risiko dalam meliput tsunami dan juga gunung meletus. Agar memahami karakteristik bencana ini, jurnalis butuh pelatihan. Minimal, jurnalis bisa memahami karakteristik dan risiko liputan di setiap jenis bencana.

Pelatihan ini bisa diperoleh dari kantor media atau dari organisasi profesinya. Sebaiknya, pelatihan ini dilakukan untuk newsroom medianya. Sehingga pasca pelatihan, diharapkan nantinya ada *Standard Operating Procedure* (SOP) menghadapi bencana. SOP bencana di media itu sangat penting, karena akan menentukan siapa yang berada di newsroom dan siapa yang berangkat liputan ke lokasi bencana.

Pelatihan kepada jurnalis terkait bencana ini juga penting dalam penanggulangan bencana. Jangan sampai, sumber daya penanggulangan bencana justru digunakan jurnalis yang tak paham dengan kondisi bencana. Jangan sampai, jurnalis yang liputan justru jadi objek berita.

## ■ Kesiapan APD, logistik hingga Asuransi

Persiapan lain untuk meliput bencana adalah, kesiapan alat perlindungan diri atau APD serta logistik. Media dan juga jurnalis mesti paham, setiap bencana bisa saja membutuhkan APD yang berbeda-beda. Maka itu, pemilihan APD yang cocok tergantung kondisi bencana apa yang akan diliput. Sebagai contoh, APD untuk liputan bencana banjir berbeda dengan APD yang dibutuhkan untuk liputan wabah. Untuk liputan banjir, jurnalis butuh pelampung, adapun liputan wabah butuh masker dan *hand sanitizer*. Kebutuhan APD untuk liputan bencana seperti konflik sosial berbeda lagi, yaitu helm pengaman dan baju pengaman agar tidak terkena lemparan batu.

Selain APD yang berguna di lokasi bencana, jurnalis juga perlu mempersiapkan logistik yang memadai saat berangkat ke lokasi. Apa saja peralatan dan logistik yang akan dibawa sangat tergantung pada lokasi dan besarnya dampak bencana. Jika di lokasi bencana yang dituju masih ada pedagang makanan, tentu tak banyak yang perlu dipersiapkan. Namun jika tak ada yang berjualan, solusinya adalah membawa ransum sendiri.

Selain itu, wartawan yang ke lapangan juga wajib membawa kecukupan sandang yang sesuai medan, termasuk juga obat-obatan pribadi. Berikutnya, juga perlu dipersiapkan alat pendukung kerja dalam kondisi darurat, mulai dari telepon satelit, *power bank*, roll kabel, laptop, kamera, *smartphone*, kantong sampah, kompas, hingga *dry box/bag* atau pelindung alat elektronik jika terjadi hujan dan banjir.

Perusahaan media wajib memastikan ketersediaan APD, logistik, hingga peralatan kerja bagi jurnalisnya yang dikirim ke lapangan. Sebagian APD dan peralatan kerja tertentu, harus disediakan oleh perusahaan media, terutama jenis perlengkapan yang bisa digunakan secara bergantian seperti pelampung atau helm. Telepon satelit juga

termasuk peralatan yang seharusnya disiapkan perusahaan media. Bahkan, dalam kasus banjir Jakarta yang sudah menjadi rutin, perusahaan media berbasis di Jakarta sebaiknya menyediakan perahu karet untuk kepentingan wartawannya peliputan. Ini karena banyak kasus, wartawan yang terpaksa menumpang di perahu karet untuk evakuasi korban, seperti terjadi dalam bencana banjir Jakarta pada Januari 2020 lalu, sehingga mengundang respon negatif di kalangan publik. Jika tidak memungkinkan, organisasi wartawan, seperti Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia, bisa mempertimbangkan untuk pengadaannya bagi kepentingan anggotanya.

Selain mempersiapkan peralatan dan logistik, yang juga harus disiapkan adalah asuransi bagi wartawan yang meliput daerah berisiko. Selain asuransi dasar kesehatan dan jiwa, jika diperlukan adanya asuransi tambahan seperti asuransi perjalanan. Sebagai catatan, dukungan peralatan untuk keselamatan, logistik, hingga asuransi ini harus diberikan bukan hanya kepada wartawan tetap, namun juga koresponden, khususnya yang mendapatkan penugasan di area berisiko.

## ■ Memiliki Rencana Tanggap Darurat

Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, Indonesia berada di zona geologi yang sangat rentan. Bencana gempa bumi, tsunami, hingga letusan gunung api bisa terjadi sewaktu-waktu, tanpa bisa diprediksi dengan pasti sebelumnya. Selain itu memang ada bencana yang bersifat rutin, seperti banjir. Sekalipun demikian, karakter banjir juga bisa berubah, seiring dengan terjadinya perubahan iklim dan tata guna lahan. Sebagaimana kawasan yang sebelumnya tidak banjir, bisa kebanjiran, seperti terjadi di Jakarta pada awal 2020.

Menyikapi situasi penuh ketidakpastian ini, perusahaan media perlu memiliki rencana tanggap darurat, yang meliputi dua hal. Pertama terkait keamanan jurnalis dan karyawan lain. Kedua, terkait dengan skenario untuk tetap bisa menghasilkan kualitas liputan yang terbaik dalam kondisi terburuk. Dalam kasus peliputan wabah seperti Covid-19 ini, rencana darurat juga harus disiapkan jika ada karyawan yang tertular virus saat peliputan, termasuk juga kepada keluarga mereka. Perusahaan media harus menempatkan keselamatan pekerjanya sebagai yang utama dengan membantu sejak upaya mendapatkan tes, isolasi atau perawatan, baik kepada karyawan bersangkutan maupun keluarga mereka.

Selain itu, rencana darurat juga perlu dipersiapkan saat menerjunkan wartawan ke lokasi bencana. Kondisi-kondisi lain yang perlu diantisipasi juga meliputi ancaman keamanan, kehilangan kontak, terdampar di lokasi yang tak bertuan, ditangkap termasuk ancaman terpapar wabah saat berada di lokasi bencana. Menghadapi situasi terburuk ini, jurnalis sebaiknya tidak menghadapinya sendiri. Harus ada keterlibatan *newsroom* atau organisasi profesi tempat jurnalisnya bernaung. Sebab, pada kondisi terburuk tentu akan ada upaya untuk perlindungan dan penyelamatan kepada jurnalisnya.

Lewat kontijensi ini, *newsroom* bisa mengontrol keselamatan jurnalis dan kontributornya saat berada di lokasi bencana. Adanya kontijensi ini pula, *newsroom* bisa menentukan skala prioritas berita yang harus dikejar dengan pertimbangan utama keselamatan jurnalis dan kontributornya.

### ■ Pemilihan Orang Sesuai Spesifikasi

Untuk menyelesaikan sebuah masalah, orang bijak memberi saran untuk diserahkan kepada ahlinya. Demikian pula dalam peliputan bencana, sebaiknya tugaskan jurnalis yang paham bencana ke lokasi. Selain bermanfaat kepada kualitas berita, pengiriman jurnalis yang menguasai liputan bencana akan mengurangi risiko keamanan dan keselamatan pada jurnalisnya.

Kondisi ini mengingatkan lokasi bencana bukanlah tempat pelatihan bagi reporter atau jurnalis junior. Mereka yang meliput bencana sebaiknya sudah memiliki pengetahuan tentang bencana, atau pernah mendapatkan pelatihan meliput bencana. Penugasan jurnalis ke lokasi bencana tanpa ada pertimbangan tertentu, bisa membahayakan nyawa jurnalis tersebut.

Sebagai contoh, liputan tenggelamnya bangkai kapal KMP Levina I di perairan Jakarta. Sejumlah media mengirimkan jurnalisnya untuk melihat bangkai kapal tersebut. Namun kejadian tak terduga terjadi, kapal tenggelam. Salah satu jurnalis televisi meninggal karena diketahui tak bisa berenang dengan tanpa bekal pelampung. Inilah potret seorang jurnalis meliput bencana justru menjadi obyek berita.

Fakta ini memperlihatkan bagaimana pentingnya mengenal risiko bencana sebelum menugaskan jurnalis liputan. Jika pun menugaskan wartawan baru, perlu ada sistem pendampingan dari yang lebih senior selama di lapangan.

## ■ Manajemen Krisis

Peran penting media dalam kondisi darurat bencana adalah menyajikan informasi yang akurat, cepat, dan dibutuhkan publik. Menjadi penting, media dan jurnalisnya, memiliki strategi yang baik. Sebelum akhirnya memutuskan mengirim jurnalis ke lokasi bencana, kita perlu mencari informasi awal, mengenai kondisinya, meliputi aksesibilitas, dampak atau skala kehancurannya, dan berbagai informasi lain. Ini menjadi bekal penting untuk menyusun strategi, perlengkapan, termasuk jumlah tim.

Begitu terjadi bencana, biasanya akses ke lokasi menjadi sulit. Transportasi umum biasanya akan terbatas, karena banyak yang berebut untuk tiba ke lokasi bencana, terutama para relawan dan tenaga kemanusiaan yang memang sangat dibutuhkan korban. Di sisi lain, infrastruktur bandara, pelabuhan, hingga jalan dan jembatan di sekitar area bencana biasanya juga terdampak, yang membuat aksesibilitas menjadi semakin terbatas. Situasi ini misalnya terjadi saat gempa dan tsunami Aceh 2004, gempa Nias 2005, gempa dan tsunami Mentawai 2010, ataupun tsunami Palu 2018. Dalam kondisi ini, biasanya yang menjadi prioritas adalah para pekerja kemanusiaan, tenaga medis, hingga logistik untuk korban dan wartawan biasanya ikut serta dalam rombongan. Namun demikian, perlu diupayakan agar jangan sampai upaya jurnalis menuju lokasi bencana ini justru menutup atau mengganggu kebutuhan tenaga darurat.

Terkait dengan Jurnalis yang berperan besar dalam menyajikan informasi yang akurat itu adalah jurnalis. Selain mencari informasinya, jurnalis juga bekerja memverifikasi dan juga konfirmasi sebelum ditampilkan atau diterbitkan.

Namun untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi itu, tentu tak bisa mengandalkan satu orang saja. Perlu kerja tim, mulai dari jurnalis yang ada di lapangan sampai dengan jurnalis yang berada di newsroom. Akan ada banyak sumber daya yang dibutuhkan agar informasi tersebut akurat.

Maka itu, dalam menghadapi bencana skala tertentu, redaksi sebaiknya mengaktivasi Manajemen Krisis dan menunjuk tim pelaksana. Selain bertujuan untuk koordinasi dalam penerbitan berita yang akurat dan sesuai fakta, tim yang bergabung dalam manajemen krisis juga berperan untuk mengontrol kondisi jurnalisnya yang ada di lapangan.

Yang tak kalah penting, manajemen krisis tersebut juga berperan untuk membagi tugas agar jurnalis yang ada di lokasi bencana tidak terbebani kerjaan berlebih. Tak hanya itu, manajemen krisis juga bisa memantau lalu lintas informasi yang berseliweran di media sosial.

Pemantauan isu di media sosial penting dilakukan agar informasi yang berkembang tidak merugikan publik. Sehingga publik tidak mengonsumsi kabar bohong atau hoaks yang kerap terjadi saat bencana tiba.

## ■ Monitor Keamanan

Prinsip yang harus dipegang jurnalis dalam peliputan bencana dan krisis adalah, tidak ada berita seharga nyawa. Artinya tak ada berita apapun yang nilainya setara dengan nyawa jurnalisnya. Oleh karena itu, faktor jaminan keamanan dan keselamatan dalam meliput bencana harus berada di urutan pertama. Contohnya, jangan berangkat liputan yang menyangkut transportasi perairan tanpa menggunakan baju pelampung, atau ke gunung tanpa peralatan dan logistik pendakian.

Artinya, peralatan untuk meliput bencana harus terpenuhi sebelum jurnalisnya berada di lokasi bencana. Jika seorang jurnalis liputan wabah, maka si jurnalis harus mendapatkan peralatan keamanan atau Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dari kantornya. Jika jurnalisnya liputan tsunami di lokasi tertentu, maka jurnalis dia harus melengkapi dirinya dengan APD seperti masker, sepatu boot dan lainnya.

Selain keamanan saat liputan, jurnalis yang liputan ke daerah bencana juga mesti mengetahui prosedur mengamankan dirinya. Ketika sampai di lokasi bencana, dia harus segera melaporkan ke newsroom. Selanjutnya, jurnalis tersebut bisa mencari pejabat berwenang terutama pejabat yang mengurus penanggulangan bencana. Ini penting untuk wawancara dan konfirmasi terkait temuan-temuan hasil reportase jurnalis di lapangan.

Yang perlu diperhatikan saat bertemu dengan pihak berwenang di lokasi bencana adalah, hindari berdebat dengan mereka. Sebab, pada situasi tertentu, mereka bisa sibuk melakukan penyelamatan dan evakuasi. Karena Anda berada di lokasi bencana, sebaiknya bersosialisasi dan bertukar informasi dengan jurnalis yang sudah ada. Cari informasi tempat menginap yang aman, jika tidak ada cari tempat umum yang bisa dijadikan tempat menginap.

Jika ingin melakukan liputan lebih jauh ke pelosok lokasi bencana, sebaiknya cari orang lokal yang menguasai medan dan lokasi. Jangan lakukan perjalanan sendirian, atau bergabung dengan jurnalis lain. Selain memastikan diri terhindari kriminal, jurnalis mesti memastikan dirinya ada di wilayah aman dari bencana susulan.

Dalam melakukan liputan, jurnalis mesti mengedepankan kemanusiaan dari pada berita atau foto yang eksklusif. Jika Anda harus memilih ambil foto atau menyelamatkan orang lain, maka menyelamatkan orang lain justru lebih prioritas.

## ■ Rotasi

Rotasi atau pergantian tugas meliput bencana merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh redaksi di lokasi bencana. Hadir di lokasi bencana bukan hal yang mudah untuk dihadapi oleh seorang jurnalis. Selain fisik, mental yang kuat sangat diperlukan ketika bencana terjadi.

Maka itu, sistem rotasi atau pergantian penugasan jurnalis yang liputan ke lokasi bencana perlu untuk dilakukan. Selain mempertimbangkan faktor fisik, juga mempertimbangkan faktor psikologi jurnalisnya. Saat meliput bencana akan ada pengalaman traumatis yang akan dialami. Pengalaman traumatis yang tidak diatasi, akan berdampak ke kejiwaan yang bersangkutan.

Adapun rotasi dalam liputan bencana sebaiknya disusun berdasarkan tingkat besarnya bencana yang dihadapi. Selain itu juga mengacu medan tempuh menuju lokasi bencana juga mesti menjadi perhatian. Contoh, bencana gempa di Palu, pergantian atau rotasi yang cocok minimal satu minggu. Ini mengingat kondisi penerbangan ke sana.

Berbeda dengan tsunami Mentawai, yang memungkinkan proses pergantian jurnalisnya lebih dari seminggu. Ini mengingat akses transportasi dari dan menuju Mentawai yang terbatas. Namun berbeda dengan jika tsunami yang terjadi di Banten, rotasi wartawan yang liputan di Banten bisa lebih cepat mengingat aksesnya mudah dijangkau dari Jakarta.

## Setelah Bencana

### ■ Trauma Healing

Jurnalis merupakan salah satu profesi yang rawan stres karena berurusan dengan banyak orang, mendapatkan banyak informasi yang bisa jadi berbeda-beda. Apalagi jurnalis yang meliput di lokasi bencana, konflik dan peristiwa yang memakan korban jiwa. Pemandangan melihat darah, mayat, kehidupan pengungsi, dan peristiwa yang menyentuh kemanusiaan yang tentu akan mempengaruhi kejiwaan jurnalis tersebut. Pengalaman tersebut tentu tak mudah menghapusnya, apalagi jika peristiwa tersebut disaksikan secara beruntun yang mengakibatkan yang bersangkutan sulit tidur atau beraktivitas.

Pengalaman yang tidak mengenakan itu bisa menimbulkan efek traumatik yang mengganggu kegiatan sehari-hari jurnalis. Trauma juga bisa membuat orang berlutut dengan rasa sedih, ingatan buruk dan kecemasan yang berlarut-larut. Trauma juga bisa membuat orang mudah kehilangan kepercayaan kepada orang lain, termasuk kerabat terdekat.

Dalam ilmu psikologi, trauma ini tak bisa dianggap sepele. Trauma merupakan disfungsi jiwa yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa traumatik. Ketika trauma yang mengarah pada gangguan stres, maka akan terjadi disfungsi yang melibatkan perubahan fisik dan kimia di dalam otak, dan mengubah respon seseorang.

Untuk menghindari hal ini pada jurnalis, sebaiknya jurnalis yang selesai meliput bencana diberikan pemulihan psikologis ini atau disebut dengan *trauma healing*. Di Indonesia, *trauma healing* beberapa kali dilakukan untuk oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk jurnalis.

# Pedoman Liputan

## Pra Bencana

Bab ini akan menjelaskan bagaimana mempersiapkan diri dan terjun meliput peristiwa yang kemudian hari ditetapkan sebagai bencana oleh pembuat kebijakan. Namanya bencana, tentu memiliki dampak kerusakan bahkan kematian. Tentu tak mudah melinyaksikannya dan menjadi bagian dalam peristiwa tersebut.

Untuk menghadapi bencana tersebut, jurnalis butuh persiapan sebelum berangkat dan liputan ke lokasi bencana. Peristiwa bencana jug sulit untuk diprediksi, sehingga sulit pula menentukan kapan dan dimana waktu terjadinya, khususnya gempa bumi dan tsunami. Untuk menghadapinya, tentu tak perlu menunggu bencana itu terjadi. Jurnalis mesti mempersiapkan dirinya agar bisa sedia ketiga ditugaskan meliput ke lokasi bencana.

Nah, jurnalis yang sedia meliput bencana ini sebaiknya memahami meliput di daerah bencana. Ini penting, karena liputan bencana baik itu perang, konflik sosial, banjir dan juga tsunami adalah liputan yang berbahaya bagi keselamatannya. Untuk liputan berbahaya ini tentu membutuhkan kecakapan khusus yang dikuasai oleh jurnalisnya. Jika tidak punya kecakapan, jurnalis yang ditugaskan ke daerah bencana bisa saja kehilangan nyawa.

Maka itu, butuh persiapan yang dilakukan jurnalis sebelum bencana terjadi. Selain jurnalis, newsroom juga harus mempersiapkan jurnalisnya melakukan peliputan bencana atau menghadapi kondisi bencana. Baik bencana yang terjadi di luar wilayahnya, atau bencana yang terjadi di lokasi redaksi itu berada.

Dalam kondisi bencana, media memiliki peran penting. Menyajikan informasi yang sesuai fakta. Apalagi media berhadapan dengan arus media sosial yang kerap menyajikan informasi yang tidak sesuai fakta bahkan kerap menyajikan informasi bohong. Bagi jurnalis, persiapan meliput bencana adalah membutuhkan ketangguhan fisik dan mental. Setelah dua hal ini terpenuhi, barulah jurnalisnya melengkapi diri dengan peralatan peliputan. Kebutuhan perlengkapan pribadi juga diperlukan, termasuk obat-obatan dan alat pelindung diri (APD).

Dalam kesiapsiagaan, sebaiknya jurnalis yang dipersiapkan untuk meliput bencana menyiagakan tas khusus yang di dalamnya sudah terdapat pakaian, jaket, *sleeping bag*, perlengkapan mandi, senter, obat-obatan, *power bank*, alat tulis, dan cadangan makanan. Tas kit tersebut siaga dan bisa langsung bawa ketika jurnalisnya dikirim ke lokasi bencana.

Tahapan lain persiapan untuk liputan ke wilayah bencana adalah, harus mendapatkan izin dari pihak keluarga. Pastikan pihak keluarga bisa berkomunikasi dengan pihak newsroom. Kebutuhan yang tak kalah penting adalah, mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan saat bekerja. Seperti kamera, buku tulis, *recorder*, telepon seluler, telepon satelit, *walkie talkie*, *power bank*, dan banyak lagi.

Selain itu, jangan untuk membawa uang tunai dalam dua dompet yang berbeda. Uang tunai dibutuhkan karena di daerah bencana akan sulit menemukan ATM. Kemudian juga membawa tas plastik sampah yang bisa digunakan untuk pelindung dari hujan dan banjir. Selain itu, jangan lupa membawa kondom untuk melindungi produk elektronik seperti telepon seluler, laptop maupun produk lainnya.

## Saat Bencana

Jurnalis yang meliput bencana, juga memiliki tantangan untuk bekerja dengan cepat dengan informasi yang akurat. Konsep kecepatan di wilayah bencana sangat dibutuhkan media terutama media online, televisi dan radio. Apalagi dalam kondisi bencana, dimana setiap informasinya dibutuhkan oleh pemirsa dan pembaca. Di sisi lain, jurnalis yang terjun di lokasi bencana memiliki tantangan untuk mencari nara sumber atau mendekati titik lokasi peristiwa yang terkadang sulit untuk dijangkau atau sulit untuk didatangi.

Di sini pentingnya pembentukan manajemen krisis di media, agar proses liputan di medan bencana tidak dipahami sebagai liputan yang biasa-biasa saja. Liputan di medan bencana merupakan liputan *extraordinary*, karena apapun bisa terjadi. Untuk itu dibutuhkan membutuhkan persiapan dan proses yang *extraordinary* juga. Apalagi jika akses telekomunikasi di wilayah tersebut lumpuh. Jika kondisi ini terjadi, jurnalis memiliki tantangan berat untuk mengirimkan berita ke redaksinya.

Hal lain yang kerap menjadi tantangan di lapangan adalah, beredarnya rumor tertentu soal bencana yang belum teruji kebenarannya. Acap kali, rumor, informasi palsu atau informasi dari narasumber abal-abal dihembuskan untuk menyesatkan informasi sebenarnya. Kondisi ini menjadi tantangan berat yang dihadapi jurnalis saat meliput bencana,. Apalagi bencana wabah COVID-19 belakangan ini.

Banyak *influencer* memproduksi konten yang terkadang belum teruji kebenarannya. Informasi yang disampaikan kemudian meresahkan, hingga akhirnya media turun tangan untuk melakukan verifikasi. Alhasil, beban jurnalis juga semakin berat. Selain memverifikasi informasi dari publik, juga memverifikasi informasi yang dihembuskan *influencer*.

Dalam konteks bencana alam juga sama. Penyebaran informasi palsu beberapa kali bikin resah publik. Ambil contoh, bencana tsunami yang terjadi di pesisir Banten pada tahun 2019 lalu, banyak rumor yang menyebutkan akan ada tsunami susulan. Informasi ini ditelan mentah-mentah sebagian warga yang kemudian berlarian mencari perlindungan diri. Di sinilah jurnalis berperan, memberikan fakta sebenarnya kepada publik dan meluruskan informasi salah yang beredar di publik

Maka itu, ketika sudah berada di lokasi bencana, jurnalisnya mengumpulkan kontak person pejabat daerah tersebut. Termasuk kontak jaringan lainnya baik organisasi masyarakat sipil, relawan, sopir ambulans, pejabat rumah sakit, organisasi profesi termasuk relawan bencana. Semakin banyak daftar kontak di lokasi bencana, maka akan memudahkan Anda memperluas cakupan liputan dan melakukan verifikasi informasi yang beredar di publik.

Selain itu, saat berada di lokasi bencana jurnalis mesti mengantongi kontak Badan SAR, BPBD/BNPB, kepolisian termasuk pejabat di gardu pandang, kepala pelabuhan atau pejabat layanan publik lainnya termasuk penggali makam. Semua kontak tersebut akan bermanfaat bagi jurnalis saat berada di lokasi bencana.

Khusus untuk bencana besar, kedatangan jurnalis ke lokasi sangatlah penting. Selain untuk mendeskripsikan kondisi bencana di lokasi, jurnalis itu juga perlu untuk penggalan fakta terkait asal mula bencana. Fakta bisa ditemukan dari hasil pengamatan langsung, wawancara saksi mata dan juga ahli. Laporan dari lokasi bencana juga bisa diperkuat dengan laporan yang diperoleh staf redaksi di kantornya, hasil *monitoring* informasi dari yang lalu lalang di media sosial.

## ■ Membuka Akses ke Lokasi Bencana

Indonesia yang memiliki 17.000 lebih pulau termasuk wilayah yang rentan terjadinya bencana. Wilayah yang luas tersebut juga menyulitkan jurnalis untuk hadir saat bencana tiba. Untuk menuju lokasi bencana, banyak jurnalis terkendala transportasi. Apalagi jika bencana itu terjadi di pelosok, di pulau terpencil atau daerah yang sulit dilewati jalur darat.

Meski masih bisa dilewati jalur udara, namun tentu tak mungkin semua media mampu menyewa helikopter untuk mengantarkan jurnalisnya ke lokasi bencana. Nah, salah satu cara yang kerap digunakan jurnalis untuk menuju lokasi bencana adalah, ikut dengan akses transportasi dari tim penanggulangan bencana atau milik TNI atau Polri.

Pilihan menumpang dengan lembaga pemerintah itu diambil karena jurnalis tak punya banyak pilihan untuk mencapai lokasi. Untuk melakukan hal ini, tentu dibutuhkan lobi-lobi dengan petinggi di lembaganya. Jika pilihan ini tak bisa dilakukan, alternatifnya adalah mencari jalur transportasi lain, atau memanfaatkan jaringan relawan yang memiliki program pengiriman bantuan.

Setelah sampai di lokasi, tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa ketersediaan akses telekomunikasi. Jika akses telekomunikasi tak bisa, laporan selengkap apapun tak akan bisa dibaca publik. Apalagi di era digital sekarang, pengiriman berita mengandalkan telekomunikasi.

*Blank spot* saat bencana ini pernah terjadi di Mentawai dan Palu, dimana akses komunikasi terputus karena rusak karena gempa. Alhasil, pengiriman berita dari lokasi bencana sulit dilakukan di beberapa hari pertama bencana. Ada beberapa pilihan yang dilakukan jurnalis dalam kondisi ini, pertama mendatangi kantor operator telekomunikasi di

wilayah tersebut. Jika memang tak tersedia, maka pilihannya adalah menggunakan telepon satelit yang tentu saja biayanya tidak murah.

Setelah memastikan adanya jalur komunikasi tersedia, barulah jurnalis bisa menjalankan pekerjaan. Untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan, pilihannya adalah datang langsung melihat peristiwa, wawancara saksi kunci, dan juga wawancara dengan pejabat penanggulangan bencana setempat. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan, maka semakin banyak bahan yang bisa diolah oleh *newsroom*.

## ■ Membuat laporan

Salah satu kekuatan dalam liputan bencana adalah, kisah deskripsi yang detail tentang bencana. Ada cerita yang menggambarkan atau visualisasikan tentang bagaimana bencana tersebut terjadi. Di sisi lain jurnalis juga bisa membuat banyak cerita terpisah-pisah mengenai kondisi saat bencana terjadi.

Selanjutnya persiapkan gaya menulis yang tentunya tergantung dari jurnalisnya. Namanya gaya tentu akan berbeda pada setiap jurnalis, ada yang punya gaya bertutur dengan kekuatan deskriptif, ada juga yang punya gaya bikin langsung menuju poin inti. Namun apapun gaya beritanya, standar jurnalistik tetap menjadi panduan.

Hal penting lainnya adalah, tetap cross check data yang diperoleh, terutama jumlah korban jiwa serta nilai kerugian yang datanya bergerak detik per detik. Selain data korban, data jumlah cedera, lokasi korban juga penting bagi publik. Informasi penting lainnya adalah, nasib korban selamat dan kondisinya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah, pengambilan gambar visual untuk anak-anak, perempuan atau kelompok marginal. Pengambilan gambar yang mengeksploitasi peristiwa tersebut mempertimbangkan faktor kejiwaan mereka, norma dan juga adat termasuk keamanan mereka. Dan yang terpenting, pengambilan gambar atau foto mesti mendapatkan izin dari objeknya.

Laporan jurnalistik yang tak kalah penting dalam penanganan bencana adalah, implementasi aliran dana untuk korban bencana. Jurnalis mesti memberitakan aliran dana tersebut sampai ke tujuan. Dorongan untuk akuntabilitas dari implementasi anggaran bencana penting untuk diungkap.

Termasuk cerita bagaimana korban bencana menjadi penolong bagi korban lainnya. Bisa digambarkan cerita tentang heroisme, semangat saling membantu antar warga dan relawan. Ceritakan bagaimana kemandirian warga melakukan penyelamatan. Kisah-kisah inspiratif ini dibutuhkan bagi korban dan juga menjadi inspirasi bagi pembaca. Yang perlu dipahami, bencana tidak hanya melahirkan nestapa dan duka, tapi juga melahirkan solidaritas, dan semangat saling membantu.

Ulasan yang juga menarik dilaporkan ke publik adalah, penyebab dari bencana jika dia adalah bencana alam. Kalau dia wabah, laporannya yang menarik adalah, bagaimana obat wabah ditemukan. Untuk dua segmen berita ini, jurnalis mesti kritis dan harus melakukan verifikasi ketat terhadap narasumber dan informasi yang beredar.

Untuk penyebab bencana misalnya, harus dijelaskan secara ilmiah. Sama halnya dengan kabar penemuan obat virus COVID-19 yang harus dijelaskan secara ilmiah pula. Namun acap kali, banyak jurnalis tidak melakukan tugas verifikasi dan konfirmasi tersebut. Alhasil, publik menerima informasi yang tak bermutu dan jauh dari fakta sebenarnya. Jurnalis jangan menjadi recorder yang hanya melaporkan apa yang ada di dalam rekamannya.

## Setelah Bencana

Peran jurnalis setelah bencana terjadi adalah memonitor dan mengawasi bagaimana program pemulihan dan rehabilitasi dilakukan secara dengan rencana. Berikut juga belanja negara yang digunakan untuk bencana, jurnalis mesti menjalankan tugasnya mengawasi pembelanjannya sudah sesuai aturan atau tidak. Jurnalis mesti awas mengawasi program pemulihan bencana ini.

Dalam program rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan, jurnalis mesti memastikan proyeknya sudah sesuai dengan mitigasi bencana. Ini bertujuan agar proses rekonstruksi dan rehabilitasi tak mengulang kesalahan sebelumnya. Selain mengingatkan akan kesalahan manusia, jurnalis juga bisa menjelaskan program yang harmoni dengan alam.

Jurnalis bisa juga menceritakan benteng tsunami alam berupa hutan bakau di pesisir Sumatera yang efektif menahan tsunami. Cerita-cerita kearifan lokal ini mesti dipopulerkan kepada publik, agar publik sadar, mitigasi bencana penting untuk keselamatan bersama.

Hal lain yang perlu menjadi sorotan jurnalis adalah mempromosikan usaha preventif terhadap bencana. Ini mengingat, mencegah bencana jauh lebih murah ketimbang mengatasinya setelah bencana datang. Seperti bencana longsor misalnya, jurnalis berperan mendidik publik menjelaskan kerentanan satu wilayah dari potensi longsor. Jurnalis juga berperan meningkatkan kesadaran warga mencegah longsor atau mencegah tertular virus covid-19.

## Kewajiban Media

Merujuk Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dijelaskan, kewajiban perusahaan media memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan. Artinya, jaminan keselamatan dan keamanan dari jurnalis saat bekerja adalah kewajiban perusahaan tempat dia bekerja.

Selanjutnya, kewajiban perusahaan juga melakukan pendidikan kepada jurnalisnya. Dalam hal ini termasuk kewajiban melatih jurnalisnya mempersiapkan diri terjun ke lokasi bencana. Selain itu, Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang juga mengatur kewajiban perusahaan melakukan keselamatan dan kesejahteraan kerja (K3).

Artinya, media yang menugaskan jurnalisnya ke lokasi liputan wajib membekali jurnalisnya dengan peralatan APD yang dibutuhkan oleh jurnalis. Begitu pula dengan asuransi yang seharusnya juga dipersiapkan oleh perusahaan media. Soal asuransi ini juga diatur oleh Dewan Pers.

Selain implementasi yang bersifat personal kepada jurnalisnya, media dalam kondisi bencana juga wajib menerapkan K3 di lingkungan kerja. Ini termasuk pembuatan mitigasi bencana di lingkungan kerja. Termasuk di dalamnya merumuskan protokol kerja di tempat kerja, terutama saat bencana seperti wabah.

Hal lain yang tak kalah penting adalah, pemberian konsultasi trauma healing bagi jurnalis yang kembali dari lokasi bencana. Nah, yang paling penting lagi, media wajib melakukan verifikasi terkait laporan yang dikirimkan jurnalisnya di lapangan. Tugas verifikasi dan konfirmasi ini penting untuk menguji informasi.

Dalam proses verifikasi dan editing beritanya, editor media juga wajib mempertimbangkan faktor keamanan dari jurnalisnya di lapangan. Penerbitan laporan tertentu bisa saja berdampak negatif ke jurnalisnya di lapangan. Atau sebaliknya, laporan dari jurnalis tersebut bisa berdampak negatif ke kelompok rentan seperti perempuan dan anak.



Doc. Save the Children Indonesia



## BAB IV

# PENJELASAN TATA CARA PELIPUTAN

Sangatlah penting bagi jurnalis untuk memiliki pengetahuan terkait kebencanaan sehingga memudahkan mereka dalam kegiatan peliputan, baik sebelum maupun setelahnya. Pengetahuan kebencanaan bagi jurnalis, tentunya harus mendapatkan dukungan penuh dari media tempat jurnalis tersebut bekerja, termasuk dukungan dari berbagai pihak yang terkait kebencanaan.

Dalam bagian ini, akan dijelaskan bagaimana penjelasan operasional dari setiap tahapan dalam panduan peliputan kebencanaan. Baca dan pahami petunjuk berikut ini, dan sesuaikan dengan kondisi kebutuhan Anda atau redaksi tempat Anda bekerja.

## Prapeliputan Bencana dan Krisis

Sebelum melakukan peliputan, ada beberapa tahapan persiapan yang harus dilakukan setiap redaksi, dan wajib diikuti oleh jurnalis khususnya yang diproyeksikan untuk terlibat dalam peliputan bencana dan krisis.

- 1. Redaksi atau newsroom wajib memastikan jurnalis yang akan ditugaskan ke lokasi bencana dalam keadaan sehat fisik dan psikis.**

Kondisi ini dapat diukur dengan pemeriksaan kesehatan secara umum (medical checkup) di laboratorium kesehatan yang kompeten. Selain pemeriksaan kesehatan secara umum, jurnalis juga wajib

mengikuti pemeriksaan kesehatan psikis di psikolog yang kompeten. Pemeriksaan ini menjadi tanggungan dari media tempat jurnalis bekerja, dan berlaku juga untuk jurnalis lepas (kontributor atau *freelancer*)

**2. Jurnalis yang ditugaskan ke lokasi bencana diutamakan yang memiliki pengalaman atau setidaknya teori dasar bertahan hidup di alam.**

Setiap jurnalis yang sebelumnya memiliki kecakapan terkait bencana dan krisis, diprioritaskan untuk melakukan peliputan, tanpa memandang masa kerja di redaksi. Hal ini penting untuk meminimalisasi risiko yang akan muncul, sekaligus memudahkan bagi jurnalis ketika meliput di lokasi.

**3. Jurnalis yang ditugaskan dalam peliputan bencana harus dibekali pengetahuan untuk meliput bencana dan krisis, termasuk kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat.**

Jurnalis haruslah mendapatkan pelatihan dalam bentuk teori dan juga praktik untuk menghadapi situasi tertentu. Di lokasi bencana misalnya terjadi gempa bumi, jurnalis harus tahu perkiraan kekuatan gempa dan bagaimana berlindung saat gempa terjadi. Di lokasi krisis seperti perang, jurnalis harus mendapatkan pelatihan mengenai jenis senjata, peluru, termasuk bagaimana bunyi senjata berdasar jenisnya untuk mengantisipasi risiko yang muncul. Hal ini juga mencakup praktik juga jurnalis menghadapi serangan fisik ketika meliput bencana dan krisis.

**4. Jurnalis dan redaksi perlu melakukan analisis risiko.**

Analisis risiko adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan peliputan bencana dan krisis. Salah satu hal yang

diperhatikan misalnya ketika meliput ke zona merah pandemi COVID-19, jurnalis yang ditugaskan haruslah tidak memiliki kondisi yang masuk kategori rentan tertular. Jurnalis yang meliput ke zona merah Covid-19 haruslah tidak berusia di atas 50 tahun, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti masalah pernafasan, diabetes, ginjal dll. Jika jurnalis memiliki riwayat penyakit seperti ini, jurnalis harus menyampaikan ke redaksi agar dapat dicarikan pengganti. Hal ini juga berlaku untuk bencana dan krisis lainnya.

**5. Perusahaan media harus membekali jurnalis yang meliput daerah bencana dengan dukungan logistik dan peralatan yang memadai.**

Jurnalis yang ditugaskan meliput kondisi bencana dan krisis harus dipersiapkan dengan minimal alat pelindung diri yang sesuai standar keselamatan. Hal ini mengacu pada jenis bencana dan krisis yang akan dihadapi. Ketika meliput gunung meletus, jurnalis harusnya dilengkapi alat pelindung diri dari debu vulkanik yang mengganggu pernafasan dan penglihatan, termasuk pelindung badan keseluruhan. Ketika meliput COVID-19 atau daerah pandemi, jurnalis harus dilengkapi dengan pakaian alat pelindung diri lengkap dan masker medis. Selain alat pelindung diri, jurnalis juga perlu dilengkapi dengan alat pelindung untuk peralatan/perengkapan peliputan seperti kamera dan laptop. Redaksi dan jurnalis juga perlu menyurvei operator yang masih bisa digunakan di lokasi bencana dan krisis, atau setidaknya memiliki telepon satelit jika dukungan operator tidak memungkinkan. Selain itu jurnalis perlu dibekali uang tunai yang berlaku di daerah bencana dan krisis, untuk menghindari jika atm tidak tersedia, termasuk bekal makanan sebelum berangkat ke lokasi peliputan.

## **6. Perhatikan keamanan daerah yang akan diliput.**

Jika kondisi bencana dan krisis mengancam keselamatan jurnalis, redaksi harus membatalkan penugasan dan menunda hingga kondisi memungkinkan untuk peliputan. Penggunaan data dari lembaga resmi atau otoritas terkait memungkinkan dalam situasi tersebut.

## **7. Setiap perusahaan media wajib memiliki protokol keamanan peliputan bencana dan situasi krisis.**

Protokol keamanan yang dimaksud adalah panduan keamanan bagi jurnalis dan pekerja media yang mencakup langkah-langkah pencegahan dan penanganan terhadap risiko bencana, termasuk bencana penyakit menular. Protokol keamanan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan jika menghadapi situasi bencana dan krisis, dan wajib disosialisasikan kepada seluruh jurnalis dan pekerja media. Protokol keamanan ini juga diterapkan untuk jurnalis di daerah yang berstatus kontributor atau freelancer.

## **8. Perusahaan media wajib memberikan asuransi dan tunjangan hidup bagi koresponden atau kontributor selama menjalankan pekerjaannya meliput bencana dan krisis.**

Asuransi yang diberikan bagi koresponden atau kontributor mencakup asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, termasuk tunjangan bagi keluarga jurnalis jika jurnalis mengalami risiko terburuk meninggal dunia.

# Selama Peliputan

Setiap jurnalis yang ditugaskan untuk meliput bencana dan krisis, wajib mengikuti panduan keselamatan selama proses peliputan. Pedoman ini tidak hanya berlaku bagi jurnalis yang hanya sekadar meliput secara biasa di lapangan, pun demikian bagi jurnalis yang melakukan laporan langsung (live report) di lokasi bencana dan krisis.

## **1. Setiap jurnalis wajib mengutamakan keselamatan dibandingkan berita yang diliput.**

Setiap jurnalis harus mengingat bahwa tidak ada liputan seharga nyawa, oleh karena itu sangat penting untuk memprioritaskan keselamatan jika dibandingkan dengan keinginan mendapatkan gambar atau eksklusivitas liputan.

## **2. Di lokasi liputan bencana alam, jurnalis mesti menyadari adanya bahaya subjektif dan bahaya objektif.**

Bahaya subjektif adalah kondisi bahaya yang timbul dari dalam diri jurnalis yang meliput di lokasi bencana dan krisis. Bahaya subjektif misalnya jurnalis mengalami gugup saat meliput atau situasi lain yang berbahaya dan disebabkan oleh diri sendiri. Adapun bahaya objektif merupakan bahaya yang berasal dari alam dan tidak bisa dihindari misalnya banjir, gempa termasuk gempa bumi susulan, udara dingin, kabut, badai, dan situasi dari alam lainnya.

## **3. Jurnalis harus menaati kode etik jurnalistik, termasuk melindungi identitas pribadi dan keluarga penyintas.**

Seluruh proses wawancara dan pengambilan gambar harus meminta izin atau harus mendapatkan persetujuan penyintas atau keluarganya. Peliputan juga mengedepankan empati kepada para korban dan penyintas, tidak mengeksploitasi duka para penyintas dan keluarga, termasuk keluarga korban.

- 4. Jurnalis wajib mematuhi protokol kesehatan selama peliputan di area yang memungkinkan terpapar penyakit menular, atau paparan radioaktif.**

Protokol kesehatan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang mengacu pada aturan dari WHO serta aturan protokol keselamatan yang dibuat oleh perusahaan media.

- 5. Jurnalis wajib terus berkoordinasi dengan redaksi saat peliputan di daerah bencana dan krisis.**

Koordinasi terkait kondisi terkini bahan peliputan dan kondisi terkini kesehatan jurnalis yang meliput. Jika memungkinkan, perlu dibuat catatan harian yang memuat materi liputan dan lokasi detail liputan termasuk orang yang dihubungi atau kontak erat selama peliputan. Informasi catatan harian ini disampaikan ke redaksi dan keluarga jurnalis untuk mengantisipasi sesuatu hal terkait keselamatan jurnalis.

- 6. Jurnalis perlu mendengar dan menyuarakan kelompok rentan.**

Kelompok rentan adalah kelompok warga yang suara atau kondisinya tidak diperhatikan dan sangat membutuhkan perhatian dari publik dan otoritas.

- 7. Gunakan narasumber yang kompeten sesuai derajat kualitas narasumber di lokasi bencana dan krisis.**

Jika berada di situasi bencana dan krisis, utamakan mewawancarai narasumber yang kompeten termasuk otoritas terkait kebencanaan dan krisis di lokasi setempat, termasuk menggunakan pendapat para pakar sebagai pembanding jika memungkinkan. Hindari mewawancarai pihak yang tidak otoritatif terkait bencana, karena berpotensi menimbulkan misinformasi dan bias pelaporan kebencanaan.

**8. Perusahaan media wajib mengganti (rotasi) jurnalis yang bertugas di lokasi bencana maksimal setiap dua pekan.**

Penggantian jurnalis yang bertugas memungkinkan jurnalis terhindar dari pengalaman traumatik dan tekanan psikologis lainnya saat meliput di daerah bencana dan krisis. Hal ini penting untuk kesehatan mental jurnalis yang meliput, serta menghindari bias dalam karya jurnalistik jurnalis di daerah bencana dan krisis. Penggantian jurnalis untuk peliputan bencana memperhatikan tingkat keparahan bencana. Untuk bencana yang sangat besar dampaknya, rotasi wajib dilakukan sekali setiap pekan. Adapun bencana yang skalanya menengah, rotasi bisa dilakukan lebih dari sepekan dan maksimal dua pekan.

Doc. Save the Children Indonesia



# Pasca Peliputan atau Penulisan tentang Bencana dan Krisis

Bagian ini bisa jadi merupakan rangkaian produksi dari jurnalis setelah selesai mengerjakan peliputan di daerah bencana dan krisis. Sudut pandang pemberitaan dan sikap independen redaksi tentu berpengaruh terhadap hasil peliputan di lapangan.

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam pelaporan liputan dari daerah bencana dan krisis.

## **1. Jurnalis wajib memahami istilah teknis dalam hal kebencanaan dan krisis, dan melaporkannya dengan bahasa sederhana ke publik.**

Penggunaan istilah dan diksi tertentu kadang menimbulkan persepsi yang berbeda untuk pengetahuan publik. Jurnalis harus paham bahwa beberapa istilah tertentu perlu dibahasakan secara sederhana. Misalnya jurnalis seharusnya bisa membedakan antara awan panas dan abu vulkanik dalam peristiwa gunung meletus. Jurnalis juga sebaiknya menghindari penggunaan istilah teknis, atau memberi penjelasan lebih lengkap jika terpaksa menggunakan istilah teknis. Hal lainnya adalah menyederhanakan istilah bahasa asing, seperti social distancing menjadi jaga jarak aman sehingga mudah dipahami oleh publik. Penggunaan diksi yang salah ataupun tidak tepat oleh jurnalis dalam melaporkan bencana dan krisis berpotensi menimbulkan misinformasi di masyarakat. Hal ini berlaku bagi redaktur atau produser di redaksi, termasuk bagi reporter yang melaporkan secara langsung di lokasi bencana dan krisis.

## **2. Jurnalis harus memegang prinsip jurnalisme yang peka, berempati, dan akurat (responsible reporting) dan tidak sensasional.**

Setiap peliputan disajikan secara akurat, tidak mengeksploitasi kondisi penyintas, korban, maupun keluarga mereka. Tidak mengedepankan sensasi dan hal lainnya yang justru bisa berpotensi menambah pengalaman traumatik bagi keluarga korban dan penyintas. Jurnalis tidak fokus pada angka korban, tapi fokus pada bagaimana pertolongan bagi para penyintas yang mudah diakses oleh publik, dan pemulihan pascabencana.

**3. Tidak menggunakan istilah atau kata sifat, termasuk konten yang bisa memicu kepanikan publik.**

Istilah yang bisa memicu kepanikan publik adalah penggunaan diksi yang berpotensi menambah kepanikan, misalnya: "virus yang mematikan ini" atau mengaitkan bencana dengan suku tertentu yang berpotensi xenofobia, atau hal-hal yang berpotensi hal yang berbau sara lainnya.

**4. Manfaatkan kemampuan cek fakta.**

Kemampuan cek fakta dapat dimanfaatkan untuk kurasi foto atau atau konten video khususnya yang didapatkan dari media sosial. Dalam setiap bencana biasanya terdapat banyak misinformasi dan disinformasi dari media sosial. Disiplin verifikasi dengan melakukan cek fakta perlu dilakukan dalam situasi seperti ini.

**5. Kedepankan edukasi, dan terus menerus memberitakan pencegahan bencana dan krisis.**

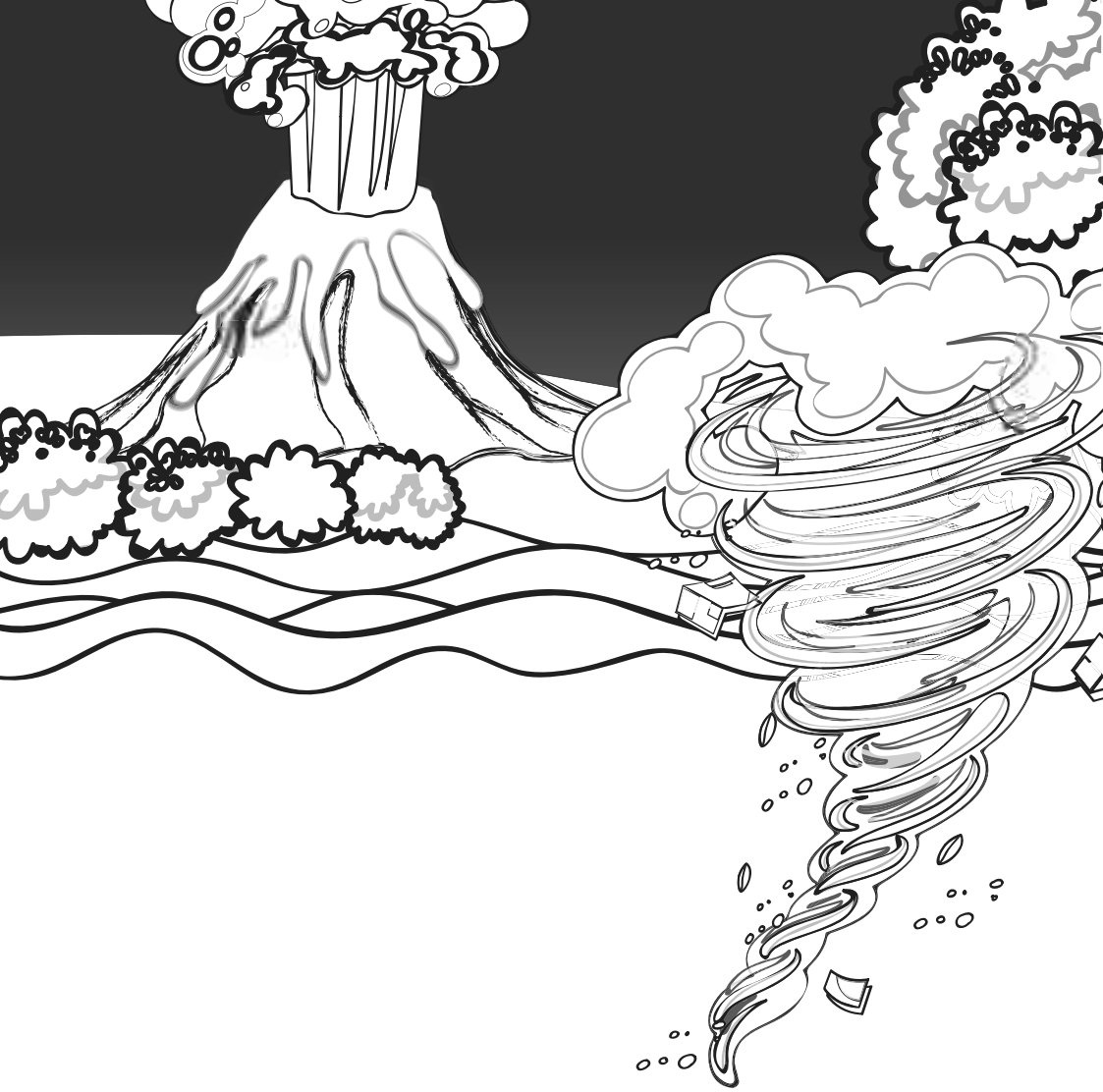
Konten edukasi terkait bencana perlu diperbanyak terlebih untuk daerah yang rawan. Selain menginformasikan kepada masyarakat kondisi alam di sekitar mereka, informasi terkait kebencanaan juga perlu mengedepankan mitigasi yang mendorong otoritas mengambil kebijakan yang tepat, serta dukungan dari para pakar.

## 6. Perusahaan media wajib mengganti hari libur jurnalis dan pemulihan trauma psikologis.

Setiap jurnalis yang mendapatkan tugas khusus peliputan di daerah bencana secara berturut-turut, wajib mendapatkan libur pengganti setelah pulang dari lokasi bencana dan krisis. Libur pengganti ini diberikan bagi jurnalis sebelum mereka kembali mendapatkan penugasan dari kantor media tempat mereka bekerja. Perusahaan media juga wajib memberikan layanan konsultasi psikolog bagi jurnalis yang telah pulang meliput dari daerah bencana, dengan atau tanpa diminta oleh jurnalis yang bersangkutan. Konsultasi psikolog ini sangat berguna bagi kesehatan mental jurnalis yang telah meliput daerah bencana.



Doc. Save the Children Indonesia



Save the Children